

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN  
PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA  
NARAPIDANA DI INDONESIA**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat –  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu  
Syari'ah

**Oleh**

**OCA MUTIARA SAFITRI**

**NPM : 1721020261**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 M / 2021**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN  
PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA  
NARAPIDANA DI INDONESIA**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat –  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu  
Syari'ah

**Oleh**

**OCA MUTIARA SAFITRI**

**NPM : 1721020261**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**  
**Pembimbing II : Dr. Hi. Yusika Semanto, B.Ed., M.Ed**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 M / 2021**

## Abstrak

Remisi merupakan pengampunan yang diberikan kepada narapidana yang berupa pengurangan masa pidana. Remisi merupakan hak dari setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Peraturan mengenai remisi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Dalam fiqh siyasah tidak ada penjelasan spesifik mengenai remisi, namun remisi digambarkan sebagai *syafaat* (pengampunan). Sejarah dalam Islam remisi pernah diberikan pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, hal itu dikarenakan adanya keadaan darurat. Secara umum tujuan dari pemberian remisi baik dari hukum positif maupun hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan.

Skripsi ini mencoba untuk menggali mengenai penerapan pemberian remisi oleh pemerintah kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam. Tujuan penelitian ini selain sebagai pemenuhan tugas yaitu untuk menambah ilmu baik bagi penulis maupun pembaca akan pengetahuan mengenai remisi.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun data primer diperoleh langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang didukung dengan data sekunder dari Peraturan-peraturan yang terkait, buku, Jurnal maupun literatur lain yang berkaitan. Setelah data terkumpul secara keseluruhan selanjutnya menggunakan pengolahan data berupa *editing* (pemeriksaan data), *coding* (penanda data), *reconstructing* (penyusunan data), kemudian dianalisis dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa remisi diberikan kepada narapidana guna untuk melindungi haknya dan sebagai bentuk perlindungan warga negara dari pemerintah. Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Kelas I Bandar Lampung telah sesuai dengan SOP yang ada pada Keputusan

Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018. Remisi dalam hukum Islam merupakan sebuah *rukshah* (keringanan), dengan tujuan untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi setiap orang yang menyesali perbuatannya dengan bertaubat. Analisis fiqh siyasah yang diperoleh yaitu pemberian remisi secara hukum positif sesuai dengan ajaran hukum Islam, dimana tujuannya untuk kemaslahatan dan diberikan oleh orang yang berkuasa atau pemerintah.

**Kata kunci : Remisi, Fiqh Siyasah, Pemerintah.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oca Mutiara Safitri  
NPM : 1721020261  
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2021

Penulis,



Oca Mutiara Safitri

NPM 1721020261



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarama 1 Bandar Lampung Telp  
(0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap  
Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada  
Narapidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas I Bandar Lampung).**

**Nama : Oca Mutiara Safitri  
NPM : 1721020261  
Program studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H  
NIP. 19712041997032001**

**Dr. H. Yusika Semanto, B.Ed, B.Ed**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki M.Si**

**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp  
(0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)” disusun oleh, Oca Mutiara Safitri, NPM: 1721020261, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Kamis, 6 Mei 2021

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Darmayani, S.H.I., M.Sy.

Penguji I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawary, S.Ag., M.H.

Penguji III : Dr. Hi. Yusika Semanto, B.Ed., M.Ed



**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 19621022199303100

## MOTTO

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى  
 اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”*

(Q.S Asy-Syura: 40)



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Orang tua tercinta Sulasmi dan Helmi Heri, atas berkat doa restu dan semangat dari mereka berdua penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Nenek, adik dan sanak saudara, terimakasih atas semangat, motivasi dan dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
3. Teman sahabat-sahabatku Ariana, Meta dan Sutra, terimakasih atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis serta telah memberikan dukungan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
4. Sahabatku semasa kuliah, Nurleli, yang telah memberikan motivasi, semangat, menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. .
5. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2017, khususnya terman seperjuangan kelas Internasional '17 yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
6. Kawan-kawan UKM-F MCC atas ilmu, pengalaman, motivasi dan bantuan dalam mengerjakan skripsi.
7. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak

## **RIWAYAT HIDUP**

Oca Mutiara Safitri, lahir pada tanggal 29 Oktober 1999 di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Anak Pertama dari pasangan Bapak Helmi Heri dan Ibu Sulasmi.

1. Taman kanak-kanak ABA I, Pagutan, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, DIY pada tahun 2004-2005;
2. Sekolah Dasar Negeri Karang Sari, pada tahun 2005-2011;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedangsari pada tahun 2011-2014;
4. Sekolah Menengah Kejuruan 1 Wonosari pada tahun 2014-2017;
5. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
6. Menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung Periode 2018/2019.
7. Menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Dema Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Periode 2019/2020.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing selama mengenyam pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Hj. Linda Firdawaty ,S.Ag, M.H. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. H. Yusika Semanto, B.Ed, M.Ed Selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

8. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, Mei 2021

Oca Mutiara Safitri  
NPM 1721020261



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Telaah Pustaka .....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20

### **BAB II KEWENANGAN PEMBERIAN REMISI OLEH PEMERINTAH**

A. Remisi Dalam Fiqh Siyasah	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	22
2. Remisi dalam Fiqh Siyasah.....	26
3. Dasar Hukum Pemberian Remisi .....	29
4. Tujuan dan Manfaat Pemberian Remisi .....	31
5. Sejarah Remisi dalam Islam.....	32
B. Remisi Dalam Peraturan Hukum di Indonesia	
1. Pengertian Remisi .....	33

2. Dasar Hukum dan Bentuk Remisi .....	35
3. Prosedur dan Kriteria Pemberian Remisi .....	38
4. Sejarah Lahirnya Konsep Remisi .....	41

### **BAB III PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG**

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Lapas .....	44
2. Visi dan Misi.....	50
3. Tata Nilai dan Motto.....	50
4. Struktur Kepengurusan .....	51
B. Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung	
1. Tahapan Pemberian Remisi.....	52
2. Kriteria Pemberian Remisi .....	55
3. Tujuan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi.....	57
4. Kewenangan dalam Pemberian Remisi .....	59

### **BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENAGAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA**

A. Implementasi Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.....	60
B. Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemeberian Remisi Kepada Narapidana .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Rekomendasi .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Masa Pemberian Remisi Umum .....	36
Tabel 2.2 Masa Pemberian Remisi Khusus .....	37
Tabel 3.1 Data Penerima Remisi .....	57

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Bimbingan

Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 : Foto Kegiatan

Lampiran 5 : Hasil Turnitin



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi proposal ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahanan makna yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah ***“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”*** maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernajaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalankannya.<sup>2</sup>
3. Kewenangan pemerintah adalah suatu hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menentukan maupun memutuskan suatu perkara atau kebijakan dalam

---

<sup>1</sup> Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook), (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 59.

<sup>2</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Erlangga: Jakarta, 2008),<sup>11</sup>

rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat.

4. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Remisi merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang ada.
5. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Perasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah penelitian mengenai kewenangan dalam pemberian remisi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang kemudian dianalisis dengan fiqh siyasah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh manusia sejak masih dalam kandungan hingga mati. Perlindungan HAM secara mutlak memperoleh legitimasi secara internasional melalui pengesahan PBB, terhadap The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum HAM / DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948. Selain itu, hak asasi manusia juga diatur secara legal di Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kebebasan ada yang menjadi bomerang bagi masyarakat sebab tindakan mereka menjadi

tidak terkontrol dan menjadikan HAM sebagai tameng untuk melindungi diri. Orang-orang yang seperti itu kemudian akan melanggar aturan yang ada yang kemudian akan menyebabkan dirinya memperoleh hukuman, baik itu sanksi social ataupun sanksi positif dari negara.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dan warga negara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum atau aturan yang berlaku. Setiap warga negara yang apabila melanggar ketentuan hukum maka harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum. Warga negara yang terbukti melanggar hukum kemudian menyebabkan dirinya menjadi narapidana dan harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku di suatu negara yang telah disahkan melalui pejabat yang berwenang. Hukum di Indonesia dapat berupa hukuman perampasan hak (kurungan/penjara) dan berupa denda. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>3</sup> Maka jelaslah bahwa segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja penyelesaiannya harus melalui jalur hukum dengan putusan hakim yang akan memberikan sanksi. Kejahatan merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan dirinya mendapatkan hukuman. Narapidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang kemudian mendapat hukuman atau sanksi berupa kurungan maupun penjara dalam jangka waktu tertentu. Narapidana menjalani sanksinya di Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini sistem penjara telah diubah menjadi sistem Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini karena sanksi yang diberikan bukan lagi digunakan dalam rangka balas dendam, namun lebih kepada pembinaan dan rehabilitasi untuk menyadarkan para

---

<sup>3</sup> Indonesia, UUD 1945 (Pasal 1 ayat (3))

narapidana agar kembali berkelakuan baik dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

Permasyarakatan merupakan sebuah proses atau usaha dari pemerintah untuk narapidana dengan harapan setelah keluar dari lapas dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan mampu berbaur kembali dengan masyarakat. Pembinaan ini dapat dimulai melalui pendekatan-pendekatan mental dan cara tertentu agar dapat membantu narapidana keluar dari lubang kejahatan. Untuk melakukan pembinaan tersebut petugas Lapas harus mengetahui dan memahami latar belakang, budaya maupun kondisi dari si narapidana. Dengan demikian, akan menimbulkan rasa saling memahami diantara kedua belah pihak yang akan memudahkan dalam proses pembinaan tersebut.

Narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan tetap memiliki haknya sesuai dengan perundang-undangan antara lain melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapat perawatan baik secara jasmani maupun rohani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan aspirasi atau keluhan, memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, didampingi penasihat hukum, memperoleh pengurangan masa pidana (remisi), mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan kebebasan bersyarat, mendapat cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan pemerintah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan suatu pemerintahan dalam menentukan atau mengambil suatu kebijakan. Kewenangan pemberian remisi merupakan hak yang dimiliki oleh Menteri Hukum dan HAM, dimana hal tersebut merupakan amanat dari Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Guna melaksanakan tugas tersebut Menteri Hukum dan HAM membuat peraturannya sendiri mengenai



remisi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pemberian remisi kepada narapidana biasanya diumumkan pada hari-hari besar nasional seperti peringatan hari Kemerdekaan Nasional dan hari-hari besar keagamaan. Remisi yang biasa diberikan biasanya berupa remisi umum dan remisi khusus. Remisi juga merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Sebab hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu tanpa melihat dan membedakan latar belakangnya. Dengan demikian hak remisi tersebut harus diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang.

Kebijakan mengenai pemberian remisi kepada narapidana selalu menjadi pembicaraan yang mengandung polemik. Hal itu dikarenakan karena adanya ketidaktahuan orang awam akan prosedur dan tata cara pemberian remisi itu sendiri. Dengan adanya Keppres, Permen maupun PP yang mengatur tentang remisi pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan hak narapidana tanpa melihat jenis tindakan pidana yang dilakukan oleh narapidana sebelumnya. Namun pemberian remisi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap hukum yang berlaku positif bertujuan melaksanakan dimensi keadilan dan kemanusiaan dimana dimensi ini tidak mengenal ras, etnik dan kebudayaan yang pluralistic.

Dengan adanya remisi maka narapidana tidak menjalankan hukumannya secara keseluruhan atau secara penuh. Adapun contoh dari pemberian remisi kepada narapidana sebagai berikut:

1. Pemberian remisi kepada narapidana di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73 sebanyak 102.976 narapidana dengan 100.776 narapidana mendapatkan remisi umum dan 2.220 narapidana mendapatkan remisi khusus. Jumlah penerima remisi di Lapas Kelas I Bandar Lampung sebanyak 450 narapidana.

2. Pemberian remisi kepada narapidana di HUT RI ke-74 sebanyak 130.383 narapidana. Jumlah penerima remisi di Lapas Kelas I Bandar Lampung sebanyak 814 narapidana.

Dari contoh pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung jumlah narapidana yang menerima remisi relative banyak dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meskipun dalam menerima remisi, narapidana harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang ada. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang berada di Lapas cukup baik, sehingga banyak narapidana yang kemudian bisa memperoleh pengurangan remisi sesuai dengan persyaratan yang ada.

Remisi dalam bahasa Arab tidak dijumpai namun ada beberapa istilah yang senada seperti *Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), dan *tahfiz* (pengurangan). Selain itu, menurut Syaid Sabiq memaafkan disebut *Al-Qowdi* atau rekonsiliasi tanpa diyat melebihi<sup>4</sup>.

Dalam Islam istilah remisi lebih dekat dengan *rukhsah* (keringanan). *Rukhsah* telah ada sejak masa Rasulullah yang dimana pengampunan itu diberikan oleh korban atau keluarga korban. Adanya pengampunan tersebut mengakibatkan pelaku tidak memperoleh hukuman atau bisa saja hanya membayar diyat yang diberikan kepada korban sebagai tanda damai. Islam selalu mengajarkan untuk saling memaafkan dan saling toleransi, sebab Islam lebih mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan adanya *rukhsah* tersebut Islam telah melindungi dan menghormati hak manusia yang telah melakukan taubat atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal ini berlandaskan pada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Syaid Sabiq (ed), *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqhus Sunah", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 419

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ.

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Burai, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Apabila ada seseorang meminta atau memerlukan suatu kebutuhan datang kepada Beliau, maka Beliau bersabda: “Berilah peringatan hukuman, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Sesungguhnya Allah dapat menetapkan hukum melalui lidah nabi-Nya sesuai kehendak-Nya.”<sup>5</sup>

Islam sebagai agama yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan umat manusia serta untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Syariat Islam merupakan syariat yang bersifat universal, yaitu diturunkan untuk semua umat di dunia, bukan untuk sebagian umat.<sup>6</sup> Islam dengan sistem hukumnya menjaga serta melindungi kehormatan manusia sehingga tercipta keseimbangan dan kemaslahatan manusia, dengan kata lain Islam sangatlah menghargai dan menjunjung tinggi nilai dari Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>7</sup>

Hukum Islam adalah pemahaman tentang Islam melalui fiqh yang didapat setelah melakukan metode ijtihad berdasarkan ilmu Ushul Fiqh dalam menentukan hukum guna menyelaraskan kehidupan manusia sehingga dapat mempertahankan kemaslahatan dan keadilan bagi semua umat. Sistem hukum Islam yang semula merupakan bagian dari kesadaran yang berlaku sehari-hari dan tidak terpisahkan dari sistem hukum adat yang beraneka penjajahan Hindia Belanda mewariskan tiga tradisi hukum kepada Indonesia merdeka, yaitu

<sup>5</sup> Imam Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari II*, terj. Abdi Ummah Ghazirah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), 536-537

<sup>6</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 105

<sup>7</sup> Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, 324

system hukum barat, system hukum Islam dan system hukum adat.<sup>8</sup> Oleh karena bangsa Indonesia merupakan negara yang majemuk, maka Islam mengatur secara umum demi terciptanya kemaslahatan dan keadilan agar setiap orang dapat hidup berdampingan dengan nyaman tanpa merasa gangguan maupun ancaman. Dengan adanya syafaat dalam fiqh siyasah Islam maka Islam telah melindungi Hak orang-orang yang mau bertaubat demi kemaslahatan bersama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung). Dimana dalam penelitian ini remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dalam Islam remisi merupakan pengampunan atau keringanan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

### **C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah untuk meneliti Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung) dan yang menjadi sub-fokus penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Staff karyawan Lapas.

### **D. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung?

---

<sup>8</sup> Sumarni, *Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, Al-Adalah Volume X. No.4 Juli 2012, 448

2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana?

### **E. Tujuan**

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan pemberian remisi di Indonesia
2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah mengenai pemberian remisi.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, diantaranya:

1. Secara tertulis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang analisis fiqh siyasah terhadap pemberian remisi kepada narapidana di Indonesia dan menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya Progra Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh siyasah.
2. Secara praktis, yaitu uuntuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitan yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, berikut akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan penulis teliti:

Ita Sapitri (2017) yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam tentang Pemberian Remisi terhadap Narapidana Pembunuhan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)”*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pemberian remisi telah sesuai dengan prosedur yang ada serta yang diamanahkan oleh Al-Qur'an dan Hadis.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Ita yaitu tentang pemberian Remisi yang dibenturkan dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah Ita membahas pemberian remisi yang terkhusus untuk narapidana pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pemberian remisi kepada narapidana secara umum yaitu tidak terkhusus pada tindak pidana tertentu.

Asnila Kurniati Siregar (2017) dengan judul *“Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Pemberian Remisi menurut Keppres No. 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi”* dalam skripsi ini disimpulkan bahwa potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan Keppres No 174 Tahun 1999 tentang remisi. Selain itu esensi dari pemberian remisi dalam siyasah syar'iyah adalah demi kemaslahatan umat manusia sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Asnila yaitu pemberian remisi berdasarkan pada Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Selain itu pemberian remisi juga dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan umat serta remisi merupakan bagian dari HAM. Perbedaan penelitian ini berdasarkan analisis Fiqh Siyasah dengan jenis tindak pidana umum maupun khusus sedangkan Asnila membahas berdasarkan siyasah syar'iyah dengan pokoknya narapidana korupsi.

---

<sup>9</sup> Ita Sapitri, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan*. Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

<sup>10</sup> Asnila Kurniati Siregar, *Tinjauan Siyasah Syari'yyah Terhadap Pemberian Remisi Berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2017.

Virgi Ernanda, (2019) *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Remisi)*, kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pemberian remisi merupakan salah satu dari perlindungan negara dalam melindungi rakyatnya, dalam kewajibannya melindungi hak asasi manusia kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam Fiqh Siyasah Islam mengenal adanya pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum Islam dilakukan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta untuk menghormati HAM yang bagi pelaku tindak pidana yang telah bertaubat.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Virgi yaitu membahas mengenai pemberian remisi yang di analisis berdasarkan fiqh Siyasah dengan tujuan kemaslahatan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi Virgi yaitu penelitian ini dasarnya Keppres No 174 Tahun 1999 tentang remisi dan PerMen Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018, sedangkan di skripsi ini berdasarkan studi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.

Elizabeth Ghazali (2016), *Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi*, dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak yang diberikan oleh hukum dengan syarat tata cara yang harus dipenuhi oleh narapidana. Pembatasan syarat dan tata cara tersebut diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan jurnal karya Elizabeth yaitu pembahasan mengenai pemberian remisi kepada narapidana tentang syarat dan tata cara mendapatkan remisi. Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan Fiqh siyasah sedangkan jurnal Elizabeth hanya membahas kebijakan pemberian remisi dalam ranah hukum positif.

---

<sup>11</sup> Virgi Ernanda, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2019

<sup>12</sup> Elizabeth Ghazali, "Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi." *Litigasi* Volume XVII, number 1: 3167 – 3220, 2016.

Norman Syahdar Idrus, Wien Sukarmini (2016), *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, hasil penelitian dari jurnal ini bahwa remisi merupakan salah satu hak narapidana yang diberikan pemerintah atas usulan kepala lapas Kelas I Cipinang. Remisi yang diberikan berupa remisi umum dan remisi khusus. Namun dalam pelaksanaan pemberian remisi ada factor-faktor kendala akibat dari ketidaksiapan staf pada kantor wilayah kementrian hukum dan HAM pusat.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan jurnal karya Norman dan Wien yaitu dalam pembahasannya membahas mengenai remisi dimana narapidana memperoleh remisi dengan usulan dari pihak Lapas. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini didasarkan dengan fiqh siyasah sedangkan penelitian ini berdasar pada hukum postive.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang mana dilakukan analisa data yang mendalam dan melalui pemikiran berkaitan dengan teori, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum mapum doktrin hukum yang disajikan dengan melakukan pendekatan hukum secara langsung dimasyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum Islam dalam membangun hukum nasional baik materil maupun spiritual demi menjawab isu hukum yang terus berkembang. Melalui data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dikembangkan berdasarkan dengan imajinasi penulis.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

---

<sup>13</sup> Sukarmini, Norman Syahdar Idrus dan Wien. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang." *Jurnal Yuridis* Volume III, Number 2: 113 – 128, 2016.



Penelitian ini adalah penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>14</sup> Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai implementasi pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

Selain *Field Research* penelitian ini juga menggunakan *Library Research* (Penelitian Pustaka) yaitu dengan mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan,<sup>15</sup> dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data primer maupun sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah utama yang diangkat dalam penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.<sup>16</sup> Yaitu mendeskripsikan mengenai pemberian remisi kepada narapidana yang sesuai dengan *fiqh siyasah*

## 2. Sumber Data

Suber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana:

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 2

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 65

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2011), 105

- a. Data Primer, yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini data primer bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, yaitu mengenai implementasi kewenangan pemerintah dalam pemberian remisi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum Primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.<sup>17</sup> Adapun sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu jurnal-jurnal ilmiah, skripsi/tesis yang senada maupun dari berita baik dari media cetak, media masa dan media online.

### 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas serta lengkap dari objek yang akan di teliti. Berdasarkan penelitian di atas dapat di pahami bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan diteliti secara jelas.<sup>18</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung baik itu kepala bidang dan anggota di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dengan jumlah pegawai sebanyak 202 orang.

Dari jumlah pegawai yang ada peneliti diarahkan untuk wawancara dengan 2 orang pegawai yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pemberian remisi sebagai subjek penelitian. Dimana 2 orang tersebut sebagai sampel dalam penelitian ini. Subjek yang dijadikan sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini yaitu pertama Bapak

---

<sup>17</sup> *Ibid.* 107

<sup>18</sup> Op.Cit, Sugiono, *Metode penelitian pendidikan*, 194

Angga dan Bapak Ivan selaku Staff dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh mengenai syarat, prosedur, program pembinaan dan pelaksanaan dalam pemberian remisi.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan menggali sumber-sumber data yang langsung dari orang atau lembaga yang berkaitan.
- b. Wawancara, yaitu sebagai proses Tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>19</sup> Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara terstruktur, dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan dengan cara pengambilan foto-foto terkait.

#### **5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data**

- a. Metode Pengolahan Data

Untuk pengolahan data maka digunakan teknik sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu suatu proses penelaahan kembali akan data-data yang telah terkumpul melalui studi pustaka yang lengkap dan relevan. Proses ini dilakukan untuk menentukan data maupun teori yang senada dan penting.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 217

2. Rekonstruksi Data (Reconstructing), yaitu penyusunan ulang data secara teratur, teratur dan logis sehingga mudah untuk dipahami pembaca.
  3. Sistematisasi Data (Sistematizing), yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup> Yaitu dengan mengelompokkan data secara sistematis sesuai dengan klasifikasi dan urutan masalah.
- b. Metode Analisi Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati.<sup>21</sup> Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara bertahap dan berlapis yang kemudian ditarik kesimpulan yang menghasilkan data baru yang sesuai dengan pemikiran imajinasi penulis.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

- a. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>20</sup> Op.Cit, Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 29

<sup>21</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 2

- b. Bab Kedua, Landasan Teori, yang meliputi: menurut hukum di Indonesia, Pengertian Remisi, Dasar Hukum dan Bentuk Remisi, Prosedur dan Kriteria Pemberian Remisi, Sejarah Lahirnya Remisi. Menurut Fiqh Siyasah, Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Pengertian Remisi, Dasar Hukum Remisi, Tujuan Pemberian Remisi, Sejarah Remisi.
- c. Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang meliputi: Gambaran Tempat Penelitian seperti, sejarah Lembaga Pemasyarakatan, Visi dan Misi, Tata Nilai dan Moto, Struktur Organisasi, dan Pelaksanaan Pemberian Remisi.
- d. Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi: Implementasi Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana.
- e. Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMBERIAN REMISI OLEH PEMERINTAH

#### A. Menurut Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari 2 kata yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. *Fiqh* berasal dari kata *faqha-yafqahu-fiqhan* yang secara bahasa berarti paham yang mendalam. Sedangkan menurut istilah *fiqh* adalah

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya : “ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).”<sup>1</sup>

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan *fiqh* adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para *mujtahid* dalam menggali suatu hukum berdasarkan dalil-dalil yang rinci yang kemudian dapat diamalkan oleh umat manusia. *Fiqh* tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah), namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini diantaranya *jinayayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *al-ahkam al-dauiyah* (hubungan internasional) dan *siyasah* (politik/ketatanegaraan).<sup>2</sup>

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>3</sup> Secara bahasa *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr, 1957), 6

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3

<sup>3</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968). 108

Secara terminologis *siyasah* menurut para ahli yaitu; Abdul Wahab Khallaf *siyasah* merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>4</sup> Menurut Louis Ma'luf *siyasah* merupakan suatu upaya membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing ke jalan yang benar menuju keselamatan.<sup>5</sup> Sedangkan Ibn Manzhur *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengarahkan umat manusia dalam kemaslahatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan suatu aspek hukum Islam yang mengatur mengenai kehidupan manusia dalam berkehidupan bernegara untuk mencapai suatu kemaslahatan. Aspek hukum dalam pengaturan ini bersifat kontekstual sesuai dengan keadaan waktu dan tempat hukum ditetapkan namun tetap berdasarkan dengan *syara'*.

Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* dibagi menjadi beberapa bagian, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menyebutkan ruang lingkup *fiqh siyasah*. Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Suthaniyyah* lingkup kajian *fiqh siyasah* yaitu:<sup>7</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah malliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah qadha' iyyah* (Peradilan)
- d. *Siyassah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'iddariyyah* (administrasi negara)

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar' iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. *Siyâsah Qadlâ' iyyah* (Peradilan)

---

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar' iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 4-5

<sup>5</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1980), 362

<sup>6</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 6, 362

<sup>7</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp).

<sup>8</sup> Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar' iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra' iyyah*, (Mesir: Dar al-Kitab 'Arabia, t.tp).

- b. *Siyâsah `Idâriyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyâsah Mâliyyah* (ekonomi dan moneter)
- d. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah* (hubungan internasional)

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar'iyyah* mempersempit ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi tiga bidang kajian yaitu:

- a. *Siyâsah Qadlâ'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah* (hubungan internasional)
- c. *Siyâsah Mâliyyah* (ekonomi dan moneter)

Menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Iddariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan)

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, maka kajian bidang *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* meliputi *siyasah tasyri'iyah* (politik hukum), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah iddariyyah* (administrasi negara).
- b. *Siyasah Dauliyyah* meliputi *siyasah harbiyyah* (perang).

---

<sup>9</sup> T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, (Yogyakarta: Maddah, t.tp), 8



c. *Siyasah Malliyyah*.

Dari penjelasan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peraturan mengenai pemberian remisi masuk dalam kajian *Siyasah Dusturiyyah*. Dimana hal ini berkaitan dengan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

## 2. Remisi dalam Fiqh Siyasah

Dalam hukum Islam tidak dijumpai penjelasan yang spesifik mengenai pengertian remisi. Namun ada kata atau istilah yang identik dengan arti maupun tujuan dari remisi itu sendiri seperti *rukhsah* (keringanan). Secara terminologi *rukhsah* merupakan upaya untuk meminta bantuan kepada orang lain atas kejahatan yang telah diperbuat. Dengan harapan orang yang dimintai pertolongan dapat menjadi perantara untuk memperoleh keringanan atas hukumannya.

*Rukhsah* memiliki manfaat dan tujuan untuk menjaga kemaslahatan serta melindungi hak asasi manusia atas penyesalan dari perbuatan yang telah dilakukannya (taubat). Pengampunan diberikan kepada orang yang telah berbuat kejahatan juga bisa berdasarkan dari perdamaianya dengan pihak korban.

Istilah remisi dalam hukum Islam digambarkan dengan *rukhsah* (keringanan). *Rukhsah* yang sesuai dalam pidana Islam yaitu seperti yang dikemukakan Al-Jurjani dalam kitabnya *Al-Ta'rifat*: suatu permintaan dari seseorang yang melakukan suatu kejahatan, kemudian mengharapkan kebebasan dari dosa yang telah diperbuat.<sup>10</sup> Pada hakikatnya, *syafa'at* terlahir karena kemuliaan dan kelembutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan izin kepada segenap makhluk yang shaleh, dari malaikat, para rasul, dan orang-

---

<sup>10</sup> Ali Ibn Muhammad, Al-Jurjani, *Al-Tarif*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1405 H), cet. Ke-I, 142.

orang mukmin, untuk memberi pertolongan pada hari kiamat terhadap orang-orang mukmin yang melakukan maksiat.<sup>11</sup>

*Rukhsah* dalam Islam memiliki ketentuannya sendiri, yaitu hanya berlaku pada perbuatan *jarimah Ta'zir*, sedangkan untuk *jarimah Qishas* dan *Hudud* jenis dan kadar hukumannya telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. *Rukhsah* mengenai *jarimah Ta'zir* terdapat dalam Q.S An-Nisaa ayat 16 :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا  
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepadanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyanya.” (Q.S An-Nisaa: 16)<sup>12</sup>

Pengurangan hukuman atau pengampunan pada zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah remisi. Remisi merupakan hak narapidana yang harus diberikan oleh pemerintah apabila narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya dan mau memperbaiki diri serta perilakunya untuk bertaubat.<sup>13</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain: membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa

---

<sup>11</sup> Bisri M. Jaerlani, *Ensiklopedia Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007), 308

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 80

<sup>13</sup> Angga, “Kesesuaian Ketentuan dan Prosedur Pemberian Remisi dengan Peraturan yang Berlaku”, *Wawancara*, November 27, 2020.

pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>14</sup>

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyasi* maka *fiqh siyasah* biasa dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi, *fiqh siyasah* adalah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.<sup>15</sup>
- b. Menurut *Wuzurat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait*, atau Lembaga Kementerian, *fiqh siyasah* adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan pada waktu sekarang dan masa yang akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>16</sup>
- c. Menurut Imam Ibn Abidin, *fiqh siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya pada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari nabi, baik secara umum maupun khusus, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan dari segi batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat dua unsur penting di dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik,

---

<sup>14</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3

<sup>15</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairima ala al-Manhaj*, (Bulaq: Musthafa al-Baibal-Halabi, t.t), vol. 2, 178

<sup>16</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzaratal-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol.25, 295.

<sup>17</sup> Ibn „Abidin, *Radd al-Muhtar „ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), vol.3, 147.

yang pertama yaitu pihak yang mengatur dan kedua yaitu pihak yang diatur.

### 3. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum mengenai remisi haruslah merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai aturan pemberian remisi, namun ada unsur-unsur yang membahas mengenai remisi, yaitu seperti yang tertuang dalam:

a. Q.S al-Maidah ayat 45 yaitu:

كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ  
قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Q.S Al-Maidah:45)<sup>18</sup>

Penjelasan ayat diatas yaitu untuk membuktikan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab suci mereka pada hakekatnya memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yang merupakan prinsip-prinsip dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik yang berlaku pada masa dulu maupun sekarang. Dengan demikian maka diharapkan agar ketentuan-

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 115

ketentuan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat manusia, terkhususnya oleh umat Islam.

b. Q.S An-Nisa (4) ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(Q.S An-Nisaa: 85)<sup>19</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa meberikan pertolongan yang baik, dengan perantara sehingga orang lain dapat ikut berbuat baik, maka ia juga akan mendapatkan pahala karena telah berupaya menolong orang lain. Namun sebaliknya, barang siapa yang memberikan pertolongan yang buruk sehingga menjadi perantara orang lain untuk berbuat keburukan, maka ia akan menanggung dosa karena telah berupaya dalam urusan yang buruk.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian pertolongan yaitu agar seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat memperoleh haknya sebagai warga negara dengan melakukan kebaikan.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 91

c. Q.S Asy-Syura (42) ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Q.S Asy-Syura: 40)<sup>20</sup>

Dalam surat ini menjelaskan mengenai bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Namun apabila seseorang telah bertaubat maka hendaklah kita memaafkan dan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi lebih baik, sebab Allah membenci orang-orang yang berbuat zalim.

Pemberian remisi yang dikemukakan oleh pemerintah kepada pelaku tindak pidana dengan melakukan perbuatan yang baik dan merubah dirinya memiliki tujuan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ia dapat berbaaur dan diterima dalam masyarakat kembali.

#### 4. Tujuan dan Manfaat Pemberian Remisi

Secara umum tujuan dan manfaat dari pemberian remisi yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Remisi juga merupakan hak dari setiap orang yang melakukan kejahatan dimana harus tetap dijaga dan dilindungi hak asasi manusianya.

Dalam hal ini tujuan dan manfaat dari pemberian *rukhsah* yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta menghormati hak asasi manusia atas penyesalan dari tindakan yang telah dilakukannya.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 487

- b. Untuk menghargai pihak korban yang telah memberi *rukhsah*, yaitu dengan jalan damai sesuai dengan anjurann Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam.
- c. Sebagai motivator bagi narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## 5. Sejarah Remisi dalam Islam

Pemberian remisi dalam Islam terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatab. Pada masa ini pengampunan oleh pemimpin pada pelaku kejahatan diberikan.

Akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan Nejd mengalami musim paceklik yang berat. Dimana peristiwa ini terjadi pada musim kemarau yang panjang, dikarenakan selama 9 bulan hujan tidak turun, sehingga menyebabkan bumi kering hingga menjadi seperti abu. Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pencuri, karena kurang illat yang mengharuskan hukuman potong tangan yang disebut dalam ushul fiqh dengan *Al illat An Naqishab*.<sup>21</sup>

Dalam riwayat tersebut dapat dipahami, bahwa kebijaksanaan Umar untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena ia memperhatikan subjek pelakunya dalam kondisi darurat, yaitu kesulitan mendapatkan bahan makanan ketika itu. Hal ini disebutkan pula di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 173

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "...tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa

---

<sup>21</sup> Op.Cit, Virgi Ernanda, *Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)*, 40

*baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al-Baqarah: 173)<sup>22</sup>

Dalam kasus pencurian dimasa Umar bin Al-Khattab ada dua yang bertentangan pada diri pencuri tersebut. Pertama menjaga diri dari jatuh kedalam kebinasaan dengan tidak diperolehkannya makan. Kedua menjaga harta orang lain dari teraniaya. Keduanya wajib dipelihara, karena kedua-duanya termasuk aspek *dharuriyat* (primer).

## **B. Menurut Peraturan Hukum di Indonesia**

### **1. Pengertian Remisi**

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Remisi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yang merupakan fasilitas pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Remisi juga dapat dikatakan sebagai salah satu sarana hukum yang memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mengupayakan warga binaan agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum serta diharapkan dapat berperan aktif dan berbaur dengan sesama masyarakat lainnya<sup>23</sup>. Remisi diberikan kepada narapidana sebagai *reward* atau hadiah atas program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, dimana remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana yang menunjukkan sikap dan perilaku yang baik selama masa pembinaan.

Menurut Andi Hamzah, remisi merupakan pembebasan hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi setiap tanggal 17 Agustus.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 26

<sup>23</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama (Bandung: Refika Aditama). 106

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 133



Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dari Remisi. Dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidanan penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”<sup>25</sup> Diatur lebih lanjut bahwa dalam KEPPRES No. 174 Tahun 1999 memberikan kewenangan pemberian remisi kepada Kementerian Hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) “Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.”<sup>26</sup>

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Remisi pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum dan Bentuk Remisi

Segala sesuatu dalam dunia hukum tentu memiliki pedoman, sebagaimana pemberian remisi. Dasar hukum pemberian remisi dapat kita ketahui sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi,
- b. Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

---

<sup>25</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi* Pasal 1 ayat (1)

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, Pasal 1 angka 3

- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Remisi yang diberikan oleh pemerintah terdapat beberapa jenis diantaranya:

a. Remisi Umum

Remisi umum merupakan remisi yang diberikan oleh pemerintah pada hari raya kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Dalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Pasal 2 huruf a menjelaskan bahwa “Remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.”<sup>28</sup>

Perhitungan masa pemberian remisi yaitu sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Masa jalan (Tahun)	Potongan Remisi (bulan)
0,5 – 1	1
1	2
2	3
3	4
4	5
Untuk tahun ke-5 (lima) dan seterusnya tetap mendapatkan remisi 6 bulan	

*Tabel 2.1. Masa Pemberian Remisi Umum*

b. Remisi Khusus

Dalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Pasal 2 huruf b menjelaskan bahwa “Remisi khusus yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.”<sup>29</sup> Remisi khusus dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, apabila ada hari keagamaan lebih dari

<sup>28</sup> Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, Pasal 2 huruf a

<sup>29</sup> Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, Pasal 2 huruf b

1 (satu) kali dalam suatu agama maka remisi diberikan pada hari besar keagamaan yang dianggap paling sakral.

Masa jalan (Tahun)	Potongan Remisi (hari)
0,5 – 1	15
1	15
2	30
3	30
4	45
Untuk tahun ke-5 (lima) dan seterusnya tetap mendapatkan remisi 60 bulan	

*Tabel 2.2 Masa Pemberian Remisi Khusus*

c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang apabila narapidana yang menjalani pidana memberikan jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>30</sup> Apabila narapidana telah berjasa bagi bangsa dan negara maka akan diberikan tambahan remisi sebesar 1/3 dari remisi umum.

### 3. Prosedur dan Kriteria Pemberian Remisi

Ketentuan dan prosedur pemberian remisi yang diberikan oleh narapidana melalui Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usulan dari Lembaga Pemasyarakatan. Proses pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mengacu pada dasar hukum yang berlaku, serta pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan tata cara pemberian remisi, artinya

---

<sup>30</sup> Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, Pasal 3 ayat (1)

Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki aturan tertentu dalam pemberian remisi.<sup>31</sup>

Dalam pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.”<sup>32</sup>

Secara administratif prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan remisi yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum,
- b. Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri,
- c. Surat Penahanan dari Kepolisian
- d. Kartu pembinaan
- e. Catatan Kepribadian atau Perilaku
- f. Tidak melakukan pelanggaran selama di Lembaga Pemasyarakatan (Register F), apabila Narapidana yang bersangkutan melakukan pelanggaran usulan remisi dapat dibatalkan.

Setelah semua persyaratan yang diperlukan terpenuhi, Kepala Lapas dan Tim Penilai akan menyerahkan berkas tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai usulan pemberian Remisi kepada Narapidana. Berkas usulan Remisi kemudian diverifikasi kelengkapan persyaratannya paling lama 2 (dua) hari sejak usulan disampaikan, apabila ada berkas yang belum terpenuhi maka akan dikembalikan ke pihak Lapas untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan usul pemberian Remisi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengembalian usulan pemberian Remisi diterima.

---

<sup>31</sup> Angga, “Kesesuaian Ketentuan dan Prosedur Pemberian Remisi dengan Peraturan yang Berlaku”, *Wawancara*, November 27, 2020.

<sup>32</sup> Keputusan Presiden, *Op.cit.*, Pasal 13 ayat (1)

<sup>33</sup> Angga, “Kesesuaian Ketentuan dan Prosedur Pemberian Remisi dengan Peraturan yang Berlaku”, *Wawancara*, November 27, 2020.

Hasil perbaikan yang telah selesai disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jendral.

Berkas yang telah diverifikasi oleh Direktur Jendral dan telah disetujui usulan Remisinya kemudian akan dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh ketetapan hukum. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk disampaikan kepada Narapidana yang memperoleh Remisi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian Remisi dan selanjutnya, diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem informasi kemasyarakatan.<sup>34</sup>

Adapun kriteria persyaratan yang harus dipenuhi Narapidana untuk memperoleh remisi diantaranya:<sup>35</sup>

- a. Berkelakuan baik, dan
- b. Menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Syarat berkelakuan baik yang dimaksud diatas, yaitu dibuktikan dengan<sup>36</sup>:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung tanggal pemberian remisi,
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, pelanggaran HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi harus memenuhi persyaratan Remisi sebagai mana dalam Pasal 5 dan memenuhi persyaratan lainnya yaitu:

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, Pasal 21 ayat (1)

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1)

<sup>36</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan,
- b. Mengikuti program Deradikalisasi
- c. Menyatakan ikrar setia kepada Negara dan pernyataan tidak mengulangi kejahatannya.
- d. Membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa pada prinsipnya pemberian remisi kepada narapidana memiliki persyaratan yang sama. Namun ada tambahan syarat yang berlaku bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan dalam golongan yang cukup berat, seperti korupsi, narkoba dan lain-lain. Perbedaan persyaratannya hanya terletak pada berkas, namun untuk proses dan tahapan selanjutnya sama.

#### 4. Sejarah Lahirnya Konsep Remisi

Pemberian remisi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 Tahun 1999 tentang Remisi yang belum sempat diterapkan namun telah diubah lagi dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang masih berlaku hingga saat ini.

Berikut merupakan aturan yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda hingga saat ini:<sup>37</sup>

- a. Gouverment besluti tanggal 10 Agustus 1935 No. 223 bijblad No. 13515 Jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22 : merupakan hadiah yang diberikan semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
- b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Acara Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri

---

<sup>37</sup> Sukarno, *Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012, (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM)*, Vol. 6 Edisi II (Mataram:Jurnal Gema Keadilan, 2019), 148-149

Kehakiman RI No. G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 Jo. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang Pengampunan.

- c. Keputusan Presiden No. 5 tahun 1987 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan-keputusan Presiden No. 5 tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04-HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.0201 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987.
- d. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Atas Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

Dari banyaknya peraturan-peraturan yang mengalami perubahan mengenai pemberian remisi tersesbut diatas dapat kita simpulkan bahwa lika-liku prinsip pemberian remisi tidaklah mudah. Dalam hal ini pemberian Remisi dapat diberikan oleh pemerintah kepada narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap narapidana yang memenuhi persyaratan berhak mengajukan dan memperoleh remisi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum.



### **BAB III**

## **PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG**

### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Provinsi Lampung, yang berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini menempati area seluas 48.050 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Pramuka No. 12 A RT.21/RW-, Rajabasa Pramuka, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

#### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan**

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio cultural, politis, ekonomi yaitu:<sup>1</sup>

1) Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI ( 1872-1945 ), terbagi dalam 4 periode yaitu :

##### **a. Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905).**

Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa ( KUHP 1866 ) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan ( pidana penjara dan pidana kurungan ). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok ( tidak terlihat ) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.

##### **b. Periode penjara sentral wilayah (1905-1921).**

---

<sup>1</sup> Sejarah Lembaga Pemasyarakatan  
<http://lapaslampung.kemendukham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> (selasa 1 des 2020 pk. 11.30)

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/ tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.

c. **Periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942).**

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* ( KUHP 1918) . Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.

d. **Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang ( 1942-1945 ).**

Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/ rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada

kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya ( penjajahan Belanda ).

- 2) Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional ( 1945-1963 ), terbagi dalam 3 periode yaitu:

a. **Periode kepenjaraan RI ke I ( 1945-1950 ).**

Periode ini meliputi 2 tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberap orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan pada tempat-tempat pengungsian, sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara de jure dan de facto tetap ada.

b. **Periode kepenjaraan RI ke II ( 1950-1960 ).**

Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.

c. **Periode kepenjaraan RI ke III ( 1960-1963 ).**

Periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemsayarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola social defense yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi

karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

Sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia berdasarkan penjelasan diatas merupakan sistem pemidanaan Penjara. Sistem penjara adalah sebuah hukuman isolasi terhadap narapidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, dimana lebih mengutamakan pembalasan dendam kepada penjahat tersebut. Namun dengan berjalannya waktu sistem pemidanaan bertransformasi menjadi sistem Pemasyarakatan. Titik awal transformasi tersebut ialah adanya peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Pramuka No.12 Rajabasa Bandar Lampung. Mulai beroperasi sejak tanggal 25 Oktober 1985. Pada awal operasional, mempergunakan nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Karang. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 2003 nomenklatur tersebut diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.<sup>2</sup>

Lapas ini menempati lahan seluas 97.432 M2 dengan perincian luas areal untuk bangunan Lapas adalah 48.050 M2 dan luas areal untuk perumahan dinas area pertanian seluas 49.382 M2. Kapasitas hunian Lapas adalah diperuntukkan bagi 620 orang, dan pada saat sekarang isi hunian adalah sebanyak 1148 orang.

Perlakuan terhadap pelanggaran hukum terus mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya peradaban dan

---

<sup>2</sup> Profil Lembaga Pemasayarakatan Kelas 1 Banddar Lampung, <http://lapaslampung.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> (selasa 1 des 2020 pk. 11.35)

kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yaitu pembalasan,penjeraan, rehabilitasi,dan intergrasi sosial. Di indonesia sejak 27 april 1964 paradikma perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan yang mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan yang menitik beratkan pada penjeraan menjadi pemasyarakatan yang menitik beratkan pada pembinaan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan,dan penghidupan antara warga binaan dengan masyarakat, yang dalam pelaksanaanya bekerjasama antara 3 (tiga) unsur, yaitu petugas,WBP dan masyarakat yang berperan sebagai partisipan, suport dan control. Untuk mewujudkan hal tersebut lapas berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang memberi pembekalan dan sebagai lembaga pembagunan yang memproduksi sesuatu yang bermanfaat, sehingga narapidana di gali potensinya, di beri kesempatan untuk berkreasi, berproduksi, berprestasi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung pertama kali berdiri dengan menggunakan nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Karang, mulai beroperasi dari Tanggal 25 Oktober 1985 dan berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman RI tanggal 16 April 2003 resmi berubah status dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

## 2. Visi dan Misi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung memiliki visi **"MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK DALAM PEMBINAAN"** dan untuk mencapai visi tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung memiliki misi sebagai Berikut:

- a. Tangguh Dalam Pengamanan
- b. Prima Dalam Pelayanan
- c. Produktif Dalam Kegiatan

## 3. Tata Nilai dan Motto

Selain visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung juga menjunjung tinggi tata nilai P-A-S-T-I yaitu:

- a. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Adapun Motto dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung memiliki Motto "**Satu Tekad Membangun Citra Pemasyarakatan**".

#### **4. Struktur Kepengurusan**

Susunan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.0101 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.0703 Tahun 1985 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- b. Kepala Kesatuan Lembaga Pemasyarakatan
  - Petugas Keamanan
- c. Sub Bagian Tata Usaha
  - Urusan Kepegawaian dan Keuangan,
  - Urusan Umum
- d. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
  - Sub seksi Registrasi
  - Sub seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
- e. Seksi Kegiatan Kerja
  - Sub seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
  - Sub seksi Sarana Kerja
- f. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
  - Sub seksi Keamanan
  - Sub seksi Pelaporan dan Tata Tertib

## **B. Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kela 1 Bandar Lampung**

### **1. Tahapan Pemberian Remisi**

Pemberian remisi dilaksanakan pada hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus maupun pada Hari Besar Keagamaan bagi penganutnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan akan disampaikan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana telah jelas diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan BAB II Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Bagian Ketiga tentang Tata Cara Pemberian Remisi PerMenKumHAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Caara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Oleh karena itu, maka setelah narapidana mengikuti dan mentaati semua proses pembinaan, dan selama menjalani masa hukumannya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana itu dapat diusulkan untuk menerima remisi.<sup>3</sup>

Bagi narapidana dengan tindak pidana Khusus apabila hendak mengajukan remisi harus menjalani minimal 1/3 dari masa pidananya. Selain itu, perbedaan berkas untuk pengajuan remisi bagi pelaku tindak pidana umum dan khusus juga ada perbedaan, yaitu bagi pelaku tindak pidana khusus harus melampirkan berkas dari penyidik baik dari kepolisian maupun jaksa, Badan Penanggulangan Narkotika Nasional (BNN), maupun Keterangan dari KPK.<sup>4</sup> Adapun bagi pelaku tindak pidana Korupsi harus melakukan pembayaran denda atau pengembalian dana sesuai dengan putusan apabila hendak mengajukan remisi.

Adapun persyaratan secara administratif yang harus dilengkapi bagi narapidana yang ingin mengajukan remisi yaitu:

- a. Fotokopi Putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan,
- b. Surat Keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti atau denda,
- c. Surat tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas,
- d. Salinan Register F,
- e. Salinan daftar Perubahan,
- f. Laporan Perkembangan Pembinaan,

Selain syarat administratif bagi pelaku tindak pidana terorisme harus melampirkan surat keterangan

---

<sup>3</sup> Angga, "Penilaian dalam Pemberian Remisi", *Wawancara*, November 27, 2020.

<sup>4</sup> Angga, "Perbedaan Syarat Dalam Pengajuan Remisi ", *Wawancara*, November 27, 2020.



Deradikalisme dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau dari Badan Penanggulangan Terorisme dan bersedia membantu penegak hukum untuk mengungkap jaringan terorismenya. Hal itu juga berlaku bagi narapidana Narkotika, juga harus membantu penegak hukum untuk membongkar jaringan narkotika, baik pengedar maupun pengguna. Bagi pelaku tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda atau sejumlah uang sesuai dengan putusan pengadilan.<sup>5</sup>

Tahapan pemberian remisi selanjutnya setelah semua administratif terpenuhi, kemudian dilakukan penilaian terhadap narapidana dengan cara melakukan sidang oleh Kepala Lapas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan remisi, kemudian usulan diteruskan kepada Kepala Kanwil setempat. Usulan yang telah masuk kemudian diverifikasi. Hasil verifikasi kemudian disampaikan oleh Kantor Wilayah kepada Direktorat Jenderal, yang kemudian dilakukan verifikasi kembali atas usulan remisi yang masuk. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan mengenai pemberian remisi yang kemudian hasil putusan disampaikan kembali ke Lapas untuk ditindaklanjuti atau disampaikan kepada narapidana yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

## 2. Kriteria Penerima Remisi

Dalam hal ini terdapat 2 kriteria, yaitu narapidana yang berhak dan narapidana yang tidak berhak menerima remisi. Kriteria narapidana yang berhak menerima remisi yaitu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### a. Berkelakuan baik,

Kriteria berkelakuan baik bagi narapidana agar mendapatkan remisi yaitu dengan mengikuti program pembinaan ada di Lapas. Program yang diadakan di

---

<sup>5</sup> Ivan, "Syarat Administratif Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Tertentu", *Wawancara*, November 27, 2020.

<sup>6</sup> Angga, "Tata Cara dan Prosedur Pemberian Remisi", *Wawancara*, November 27, 2020.

Lapas bagi narapidana meliputi berkebun, berternak, pelatihan menjahit, mengikuti kegiatan pesantren Lapas, kerja bakti lapas, pendidikan, menyulam dan membuat kerajinan tangan.<sup>7</sup>

- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, Narapidana telah menjalani masa pidananya minimal 6 (enam) bulan untuk mendapatkan remisi. Atau untuk narapidana dengan tindak pidana khusus telah menjalani 1/3 dari masa pidana yang diputuskan oleh hakim.
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi,  
Narapidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin, yaitu narapidana dianggap berkelakuan baik apabila tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir yang tercatat dalam buku register F dan mengikuti program pembinaan Lapas dengan predikat baik.
- d. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara yang dilakukan  
Syarat ini berlaku untuk perkara yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Narapidana harus membantu penegak hukum untuk mengusut dan membongkar perkara yang dilakukannya untuk menangkap siapa saja yang terlibat dalam perkara tersebut.
- e. Telah membayar lunas denda pengganti.  
Bagi narapidana korupsi harus membayar lunas denda pengganti dana yang diambil yang bukan haknya sesuai dengan putusan pengadilan. Besaran jumlah denda pengganti bagi setiap narapidana berbeda-beda, sesuai dengan kejahatan dan nominalnya masing-masing.  
Sedangkan narapidana yang tidak berhak menerima remisi yaitu sebagai berikut:
  - a. Dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,

---

<sup>7</sup> Ivan, "Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan", *Wawancara*, November 27, 2020.

- b. Masa pidana kurang dari 6 (enam) bulan,
- c. Sedang dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lapas dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi,
- d. Sedang menjalani cuti menjelang bebas,
- e. Sedang menjalani pidana kurungan pengganti denda,
- f. Narapidanan kambuhan (*residivis*), yaitu mantan narapidana yang melakukan tindak pidana kembali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Berdasarkan dari kriteria dan prosedur tersebut, maka syarat-syarat untuk memperoleh remisi tidaklah sulit. Apabila narapidana benar-benar menyesali kesalahannya dan bertaubat, serta menunjukkan sikap yang baik secara tulus remisi tersebut akan mudah untuk diperolehnya. Berdasarkan hal tersebut berikut merupakan data penerima remisi di Lapas Kelas I Bandar Lampung 2 tahun terakhir:

Tahun	Umum	Khusus
2018	450	325
2019	814	779
2020	3586	816

*Tabel 3.1 Data Penerima Remisi*

### **3. Tujuan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi**

Setiap aturan dan kebijakan tentunya memiliki tujuannya masing-masing, termasuk aturan mengenai pemberian remisi. Berikut merupakan tujuan dari pemberian remisi yaitu :

- a. Sebagai motivator dan pengingat bagi narapidana untuk berkelakuan baik selama menjalani pidananya bahkan setelah keluar dari Lapas.
- b. Sebagai upaya mengurangi dampak negatif akibat dari perampasan kebebasan dari narapidana.
- c. Motivasi bagi narapidana yang belum mendapat remisi agar lebih memperbaiki diri untuk memperoleh remisi.

- d. Remisi Khusus diberikan kepada narapidana dengan harapan dapat menjadi pemacu bagi warga binaan untuk bertaubat sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Selain dari adanya tujuan, juga adanya hambatan dalam menjalankan suatu aturan, baik itu secara internal maupun dari eksternal. Berikut beberapa hambatan yang terjadi dalam pemberian remisi yaitu:<sup>8</sup>

- a. Faktor administrasi, adanya keterlambatan pengajuan persyaratan remisi, seperti terlambat datangnya saling putusan dari pengadilan sehingga menghambat proses jalannya pengusulan pemberian remisi.
- b. Faktor perilaku narapidana, yaitu narapidana sendiri yang menghambat pemberian hak remisi dikarenakan perilakunya selama di Lapas serta ketidakdisiplinannya narapidana yang menyebabkan dirinya harus menjalani hukuman disiplin.
- c. Faktor lembaga, kurang adanya kecermatan petugas dalam mengevaluasi narapidana yang berhak menerima remisi, sehingga menyebabkan adanya salah sasaran dalam pemberian remisi.

Atas kesadaran akan tujuan yang harus dicapai dan hambatan yang dialami, maka petugas baik Kepala Lapas maupun Tim Pengawas lebih mengoptimalkan lagi sistem kerjanya. Sebagai pelaksana putusan yang ada, apabila terjadi kesalahan maka akan dilakukan tinjauan ulang untuk mencabut remisi yang diberikan kepada narapidana.

#### **4. Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Remisi**

Remisi diberikan kepada narapidana dengan mempertimbangkan kepentingan, keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Ivan, "Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi", *Wawancara*, November 27, 2020.

amanat dari Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dalam pasal 13 ayat (1) bahwa usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian jelas bahwa pemberian remisi merupakan kewenangan ruang eksekutif Menteri Hukum dan HAM.

Sesuai dengan pertimbangan pemberian remisi diatas, maka narapidana yang hendak mengajukan remisi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Persyaratan yang harus di penuhi yaitu berkelakuan baik dan minimal telah menjalani masa pidana 6 bulan. Bagi narapidana yang memenuhi kriteria untuk mengajukan remisi maka Kepala Lapas akan mengajukan kepada Kantor Wilayah setempat yang kemudian akan diteruskan kepada Kantor Wilayah Pusat. Usulan yang disetujui akan dibuat ketetapan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA**

#### **A. Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung**

Untuk menjawab permasalahan pada bab IV ini, sebagaimana telah penulis sampaikan pembahasan mengenai pelaksanaan pemberian remisi pada bab-bab sebelumnya, bahwa pada dasarnya tujuan dari pemberian remisi yaitu untuk kemaslahatan. Remisi diberikan kepada narapidana sebagai motivasi untuk berkelakuan baik, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk sekitar baik di Lapas maupun setelah kembali kemasyarakatan dengan harapan dapat berbaur, sehingga program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat tercapai dengan maksimal. Dimana program pembinaan yang dilakukan oleh Lapas sesuai dengan tujuan dari Perundang-undangan tentang remisi yang berlaku.

Pemberian remisi merupakan salah satu wujud pemenuhan dari rasa keadilan bagi setiap warga negara yang mana hal tersebut diatur sesuai dengan Undang-undang yang mengatur mengenai persamaan bagi setiap warga negara dimuka hukum (*equality before the law*). Hakekat dari pemenuhan rasa keadilan ini merupakan cerminan dari terselenggaranya sistem peradilan pada suatu negara. Pada dasarnya remisi merupakan wujud pemenuhan rasa keadilan, sebab remisi diberikan kepada setiap narapidana yang memenuhi persyaratan tanpa melihat latar belakang narapidana tersebut selama ia menunjukkan perilaku baik dalam menjalani masa pidananya.

Dengan mengacu pada dasar hukum pemberian remisi Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah memberikan remisi kepada narapidana yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan aturan tersebut penegak hukum telah melaksanakan salah satu dari upaya perlindungan hukum bagi warga negara. Hal ini sesuai dengan tugas dari pemerintah untuk menghormati, melindungi, memajukan dan menegakan hukum di Indonesia.

Remisi pada dasarnya merupakan hak dari narapidana, namun untuk memperoleh hak tersebut narapidana juga harus memenuhi kewajibannya yang menjadi syarat untuk memperoleh remisi. Pemberian remisi pada dasarnya bisa menjadi dorongan atau motivasi bagi narapidana untuk mengubah sifat dan perilakunya yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Harapan dari perubahan tersebut tidak hanya ketika berada di Lapas, namun juga setelah kembali ke masyarakat.

Untuk memperoleh remisi narapidana harus mengikuti program pembinaan yang diadakan di Lapas, dimana program tersebut dapat menjadi tolak ukur penilaian bagi narapidana. Apabila narapidana menjalani program pembinaan dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan bahwa dirinya telah berubah, maka tidak menutup kemungkinan setelah kembali ke masyarakat narapidana tersebut menjadi tokoh agama ataupun tokoh masyarakat.

Pemberian remisi dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum pada perundang-undangan yang berlaku. Dimana syarat utama untuk memperoleh remisi yaitu :

1. Berkelakuan baik, dan
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Persyaratan tersebut bisa dibilang cukup mudah dan sederhana, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi narapidana untuk menyepelkannya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan syarat tambahan bagi narapidana khusus, seperti narkoba, korupsi, terorisme, maupun kejahatan berat lainnya yaitu:

1. Bersedia membantu penegak hukum untuk membongkar perkara yang dilakukan,
2. Membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan,
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Lapas/ Badan Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan Ikrar
  - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis apabila merupakan warga negara Indonesia, dan
  - b. Berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana terorisme secara tertulis bagi warga negara Asing yang melakukan kejahatan terorisme.

Dalam pelaksanaannya pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah mengikuti prosedur yang ada. Dimana usulan remisi diajukan oleh Kepala Lapas kepada Kantor Wilayah. Usulan tersebut akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu dan akan disampaikan kembali kepada Kepala Lapas apabila terdapat usulan yang ditolak. Untuk usulan yang di tolak akibat kurang lengkapnya berkas administratif Kepala Lapas dapat melakukan kelengkapan kembali. Setelah usulan diterima, kemudian diajukan ke Direktur Jenderal. Usulan remisi yang diterima akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM yang kemudian Direktur Jenderal membuat ketetapan tentang pemberian remisi atas nama Menteri Hukum dan HAM. Hasil ketetapan disampaikan kembali kepada Kepala Lapas untuk diberikan kepada narapidana yang berhak menerima remisi.

Secara psikologis, narapidana yang tidak mendapatkan remisi akan merasakan kecemburuan pada narapidana yang mendapat remisi. Namun hal tersebut menjadi pemicu atau motivasi bagi narapidana yang tidak mendapat remisi untuk lebih introspeksi diri dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi.

Secara sosiologis, pemberian remisi kepada narapidana dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Selain itu timbulnya diskriminasi kepada



narapidana yang telah kembali ke masyarakat dikarenakan telah dianggap tidak baik. Hal demikian dapat mendorong mantan narapidana tersebut melakukan kejahatannya kembali. Diskriminasi seperti itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak narapidana sebagai warga negara yang harus tetap dilindung. Masyarakat tidak mengetahui bahwa selama masa pidananya narapidana telah memperoleh pembinaan serta bekal untuk berupab menjadi lebih baik dan bertaubat. Dengan adanya peraturan secara yuridis yang mengutamakan rasa keadilan maka remisi secara lambat laut dapat diterima dan dipahami makna dari pemberian remisi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staf yang bertanggung jawab mengenai pemberian remisi, mereka menyebutkan bahwa pelaksanaan peremberian remisi berjalan dengan cukup baik. Oleh karena, persyaratan untuk menerima remisi bisa dikatakan mudah maka penerima remisi cukup banyak, baik itu remisi umum maupun remisi khusus. Penerima remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung juga mengalami peningkatan pertahunnya. Hal itu menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lapas dapat diterima dan terlaksana dengan baik.

Dari hasil tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa remisi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah sesuai dan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pemberian remisi juga sesuai dengan asas hukum persamaan bagi setiap warga negara di muka hukum (*equality before the law*). Dimana setiap narapidana berhak memperoleh remisi selama semua persyaratannya terpenuhi.

## **B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana**

Secara umum telah dijelaskan pada poin sebelumnya mengenai implementasi dalam pemberian remisi. Dalam fiqh maupun hukum Islam memang tidak ada penjelasan secara rinci mengenai remisi, namun pada dasarnya prinsip-prinsip yang

diberlakukan oleh pemerintah dalam pemberian remisi sejalan dengan tujuan dari hukum Islam, yaitu demi kemaslahatan.

Dalam hal ini narapidana yang melakukan tindak kejahatan akan mendapatkan hukumannya berupa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pemidanaan sendiri yaitu untuk mencegah seseorang maupun sekelompok orang untuk mengulangi kejahatan yang telah mereka lakukan. Selain itu, selama menjalani masa pidanannya narapidana juga diberikan pembinaan oleh Lapas dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tujuan pemidanaan dalam Islam sendiri yaitu untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga manusia dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Remisi dalam Islam dikenal dengan istilah *rukhsah* (keringanan). Keringanan diberikan oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang selama remisi yang diberikan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentraman bagi masyarakat.

Adapun dalam ketentuan pemerintah narapidana yang mengajukan remisi harus memenuhi persyaratan yaitu : a) berkelakuan baik, dan b) telah menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan. Syarat mengenai berkelakuan baik sendiri sesuai dengan ketentuan ajaran Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengatur segala hal yang diperbolehkan dan dilarang dan Allah Maha Pemaaf bagi hambanya yang mau mengakui kesalahannya dan bertaubat.

Pelaksanaan pemberian remisi dilakukan secara bertahap dan bertingkat, hal ini guna untuk menilai sejauh mana narapidana tersebut menyesalai kesalahannya dan berniat untuk memperbaiki diri. Apabila selama dalam pantuan pemberian remisi, narapidana yang mendapat remisi kemudian melakukan larangan yang ditentukan untuk memperoleh remisi, maka pada waktu pemberian remisi selanjutnya ia tidak memperoleh remisi.

Dalam surat Asy Syura ayat 40 menjelaskan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya, namun memaafkan

dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya itu lebih baik, karena Allah membenci orang-orang yang berbuat dzalim. Hal ini sesuai dengan pemberian remisi oleh pemerintah bahwa memberikan pengampunan berupa keringanan hukuman dan pembinaan kepada narapidana yang bertaubat agar setelah keluar dari Lapas dapat diterima kembali dimasyarakat. Sebab Allah Maha Pengasih dan Maha Penyanyang, Maha Menghendaki kepada siapa saja untuk diberi *taufiq* dan *hidayahnya*.

Sanksi pidana yang berikan kepada narapidana yang melakukan suatu kejahatan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Namun pidana atau sanksi ini tidak selalu berjalan dengan mulus, sebab pada dasarnya pemberian sanksi tidak disenangi oleh orang yang menerima sanksi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pidana atau pemberian sanksi harus mempunyai nilai baik dan ideal, seperti:

1. Memiliki fungsi prefentif dan efek jera kepada narapidana agar tidak melakukan kesalahannya lagi.
2. Pidana yang diberikan bukan merupakan upaya balas dendam namun pembinaan.
3. Hukuman diberikan sebagai sugesti bagi setiap orang agar tidak melakukan kejahatan.

Nilai-nilai dalam pemberian hukuman diatas sudah sesuai menurut Islam. Namun dalam Islam mengenal istilah pemaafan atau pengampunan. Pengampunan dapat diberikan oleh pihak korban maupun penguasa yang berwenang, dimana dengan adanya pengampunan tersebut seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dapat terbebas dari hukumannya dengan mengganti rugi atau memperoleh keringanan pidanan dari masa pidana yang seharusnya ia terima.

Konsep pengampunan ini dianggap konsep yang paling baik dalam pandangan nilai ihsan atau kemanusiaan. Sebab semua manusia tentu pernah melakukan kesalahan dan memaafkan merupakan suatu perbuatan yang mulia. Pemaafan sendiri apabila dilihat dari segi psikologis lebih baik daripada konsep

pemberian pidana atau sanksi. Maaf atau pengampunan dari seseorang akan lebih menyentuh hati orang yang telah melakukan kesalahan untuk menyesali perbuatannya dan menimbulkan rasa malu pada diri sendiri yang kemudian mendorong dirinya untuk lebih baik dan selalu berbuat kebaikan. Namun, konsep pidana atau pemberian sanksi pada dasarnya dapat menimbulkan penyakit hati menjadi dendam.

Pemidanaan sendiri memiliki tujuan yang baik. Bagi narapidana yang menerima dan menjalani masa pidananya dengan ikhlas serta sadar bahwa apa yang diperoleh merupakan buah dari tindakannya maka tujuan pembinaan yang diberikan selama masa pidana pun akan tercapai. Pemberian remisi bukan merupakan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma, namun harus ada upaya untuk memenuhi syarat atau kriteria untuk memperoleh remisi sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa syarat atau kriteria dalam pemberian remisi secara hukum di Indonesia (hukum positif) sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini terlihat bahwa dalam pemberian remisi narapidana harus berperilaku baik selama menjalani masa pidana, mengakui dan menyesali perbuatannya, mau bertanggung jawab dan bertaubat atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung (Lapas Rajabasa) telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian remisi di Lapas Rajabasa dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ada. Syarat yang harus dilengkapi oleh narapidana untuk memperoleh remisi yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan, serta syarat administratif lainnya yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat pidananya. Usulan remisi diajukan oleh Kepala Lapas melalui Kepala Kanwil setempat. Direktur Jenderal membuat ketetapan mengenai pemberian remisi atas nama Menteri Hukum yang berwenang. Hasil ketetapan disampaikan kembali kepada Kepala Kanwil untuk disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diserahkan kepada narapidana yang berhak.
2. Remisi dalam Islam dikenal dengan istilah *rukhsah* (keringanan). Maksud dan tujuan dari pemberian *rukhsah* yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta melindungi hak-hak setiap orang menyesali perbuatannya dan bertaubat. Setiap manusia yang melakukan kesalahan dan diberi pentunjuk dan hidayah oleh Allah untuk bertaubat maka kita sebagai manusia harus memaafkan, sebab memaafkan lebih mulia daripada membalas dendam. Sebagaimana dengan dasar hukum pemberian remisi dalam Al-Qur'an yang telah dijelaskan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pemberian remisi secara hukum positif maupun secara ketentuan Islam sudah sesuai namun ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya. Dimana pelaksanaan pemberian remisi harus memenuhi syarat dari prinsip-prinsip yang sejalan dengan Islam yaitu

bertaubat dan diberikan oleh pihak korban maupun penguasa yang berwenang. Namun dalam hukum Islam pemberian maaf kepada orang yang berbuat kesalahan tidak harus melalui persidangan dan menjalani masa pidana.

## **B. Rekomendasi**

Atas penelitian yang telah penulis lakukan, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung untuk narapidana yang telah memenuhi persyaratan usulan remisi agar segera ditindaklanjuti dan membantu proses pengajuan remisi bagi narapidana yang berhak.
2. Bagi narapidana untuk mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan baik, sebab hal tersebut akan bermanfaat bagi dirinya baik di dalam Lapas maupun setelah keluar dari Lapas.
3. Bagi masyarakat agar menerima kembali narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, tanpa melakukan diskriminasi dan membantu agar narapidana yang telah bebas dan bertaubat dapat istiqamah dalam kebaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadist**

- Departemen Agama RI, 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Jakarta: Departemen Agama.
- Imam Bukhari, 2002. *Terjemah Shahih Bukhari II*, terj. Abdi Ummah Ghazirah, Jakarta:Pustaka Azam

### **Buku**

- Ahmad, B. (n.d.). *Filsafat Hukum Islam*.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika.
- Al-Mawardi. (n.d.). *al-Akham al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-Shidieqy, T. H. (n.d.). *Pengantar Siyasa Syariyyah*. Yogyakarta: Maddah.
- Hadi, S. (1986). *Metodologi Research, Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- Hanafi, A. (1976). *Asas-asas Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jaelani, B. M. (2007). *Ensiklopedia Islam*. Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta.
- Khallaf, A. W. (1997). *Al-Siyasa al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Ma'luf, L. (1980). *al-Munjid fi al-Lughah wa al'A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Manzhur, I. (1968). *Lisan al-'Arab Jus 6*. Beirut: Dar al-Shadr.
- Moloeng, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. I. (n.d.). *Al-Jurjani Al-Tarif*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Priyanto, D. (n.d.). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunah*". Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taimiyah, I. (n.d.). *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab 'Arabia.
- Zada, M. I. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Zahrah, M. A. (1957). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al Fikr.
- Peraturan Perundang-undangan
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi,
- Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

### **Jurnal dan Naskah Ilmiah**

- Ernanda, Virgi. 2019. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)*. Bandar Lmapung: UIN Raden Intan Lampung.  
<http://repository.radenintan.ac.id/6474/1/SKRIPSI%20VIRGI%20ERNANDA.pdf>.
- Ghozali, Elizabeth. 2016. "Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi." *Litigasi* Volume XVII, number 1: 3167 - 3220.
- Sapitri, Ita. 2017. *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Siregar, Asnila Kurniati. 2017. *Tinjauan Siyasah Syari'yyah Terhadap Pemberian Remisi Berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi*. Medan: UIN Sumatra Utara.



Sukarmini, Norman Syahdar Idrus dan Wien. 2016. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang." *Jurnal Yuridis* Volume III, Number 2: 113 - 128. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/175/147>.

Sumarni, 2012, *Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, Al-Adalah Volume X. No.4 Juli <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/298/640>

### **Sumber Online**

Budhiana, Nyoman. 2019. *HUT Ke-74 RI, 130.383 Narapidana Dapat Remisi*. Jakarta: Bisnis.com. <https://m.bisnis.com/amp/read/2019-817/16/1137729>.

Profil Lembaga Pemasyarakatan, <http://lapaslampung.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> (selasa 1 des 2020 pk. 11.30)

### **Wawancara**

Angga, Wawancara, 2020. "Kesesuaian Ketentuan dan Prosedur Pemberian Remisi dengan Peraturan yang berlaku", Bandar Lampung.

Ivan, Wawancara, 2020, "Syarat Administratif Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Tertentu", Bandar Lampung.



## MOTTO

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى  
 اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”*

(Q.S Asy-Syura: 40)

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Orang tua tercinta Sulasmi dan Helmi Heri, atas berkat doa restu dan semangat dari mereka berdua penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Nenek, adik dan sanak saudara, terimakasih atas semangat, motivasi dan dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
3. Teman sahabat-sahabatku Ariana, Meta dan Sutra, terimakasih atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis serta telah memberikan dukungan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
4. Sahabatku semasa kuliah, Nurleli, yang telah memberikan motivasi, semangat, menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. .
5. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2017, khususnya teman seperjuangan kelas Internasional '17 yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
6. Kawan-kawan UKM-F MCC atas ilmu, pengalaman, motivasi dan bantuan dalam mengerjakan skripsi.
7. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak

## **RIWAYAT HIDUP**

Oca Mutiara Safitri, lahir pada tanggal 29 Oktober 1999 di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Anak Pertama dari pasangan Bapak Helmi Heri dan Ibu Sulasmi.

1. Taman kanak-kanak ABA I, Pagutan, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, DIY pada tahun 2004-2005;
2. Sekolah Dasar Negeri Karangsari, pada tahun 2005-2011;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedangsari pada tahun 2011-2014;
4. Sekolah Menengah Kejuruan 1 Wonosari pada tahun 2014-2017;
5. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
6. Menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung Periode 2018/2019.
7. Menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Dema Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Periode 2019/2020.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar'iiyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing selama mengenyam pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Hj. Linda Firdawaty ,S.Ag, M.H. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. H. Yusika Semanto, B.Ed, M.Ed Selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

8. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, Mei 2021

Oca Mutiara Safitri  
NPM 1721020261

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Telaah Pustaka .....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20

### **BAB II KEWENANGAN PEMBERIAN REMISI OLEH PEMERINTAH**

A. Remisi Dalam Fiqh Siyasah	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	22
2. Remisi dalam Fiqh Siyasah.....	26
3. Dasar Hukum Pemberian Remisi .....	29
4. Tujuan dan Manfaat Pemberian Remisi .....	31
5. Sejarah Remisi dalam Islam.....	32
B. Remisi Dalam Peraturan Hukum di Indonesia	
1. Pengertian Remisi .....	33



2. Dasar Hukum dan Bentuk Remisi .....	35
3. Prosedur dan Kriteria Pemberian Remisi .....	38
4. Sejarah Lahirnya Konsep Remisi .....	41

### **BAB III PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG**

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Lapas .....	44
2. Visi dan Misi.....	50
3. Tata Nilai dan Motto.....	50
4. Struktur Kepengurusan .....	51
B. Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung	
1. Tahapan Pemberian Remisi.....	52
2. Kriteria Pemberian Remisi .....	55
3. Tujuan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi.....	57
4. Kewenangan dalam Pemberian Remisi .....	59

### **BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENAGAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA**

A. Implementasi Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.....	60
B. Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemeberian Remisi Kepada Narapidana .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Rekomendasi .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Masa Pemberian Remisi Umum .....	36
Tabel 2.2 Masa Pemberian Remisi Khusus .....	37
Tabel 3.1 Data Penerima Remisi .....	57

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Bimbingan

Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 : Foto Kegiatan

Lampiran 5 : Hasil Turnitin

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi proposal ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahanan makna yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah ***“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”*** maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernajaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalankannya.<sup>2</sup>
3. Kewenangan pemerintah adalah suatu hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menentukan maupun memutuskan suatu perkara atau kebijakan dalam

---

<sup>1</sup> Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook), (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 59.

<sup>2</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Erlangga: Jakarta, 2008), 11

rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat.

4. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Remisi merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang ada.
5. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Perasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah penelitian mengenai kewenangan dalam pemberian remisi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang kemudian dianalisis dengan fiqh siyasah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh manusia sejak masih dalam kandungan hingga mati. Perlindungan HAM secara mutlak memperoleh legitimasi secara internasional melalui pengesahan PBB, terhadap The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum HAM / DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948. Selain itu, hak asasi manusia juga diatur secara legal di Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kebebasan ada yang menjadi bomerang bagi masyarakat sebab tindakan mereka menjadi

tidak terkontrol dan menjadikan HAM sebagai tameng untuk melindungi diri. Orang-orang yang seperti itu kemudian akan melanggar aturan yang ada yang kemudian akan menyebabkan dirinya memperoleh hukuman, baik itu sanksi social ataupun sanksi positif dari negara.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dan warga negara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum atau aturan yang berlaku. Setiap warga negara yang apabila melanggar ketentuan hukum maka harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum. Warga negara yang terbukti melanggar hukum kemudian menyebabkan dirinya menjadi narapidana dan harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku di suatu negara yang telah disahkan melalui pejabat yang berwenang. Hukum di Indonesia dapat berupa hukuman perampasan hak (kurungan/penjara) dan berupa denda. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>3</sup> Maka jelaslah bahwa segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja penyelesaiannya harus melalui jalur hukum dengan putusan hakim yang akan memberikan sanksi. Kejahatan merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan dirinya mendapatkan hukuman. Narapidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang kemudian mendapat hukuman atau sanksi berupa kurungan maupun penjara dalam jangka waktu tertentu. Narapidana menjalani sanksinya di Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini sistem penjarahan telah diubah menjadi sistem Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini karena sanksi yang diberikan bukan lagi digunakan dalam rangka balas dendam, namun lebih kepada pembinaan dan rehabilitasi untuk menyadarkan para

---

<sup>3</sup> Indonesia, UUD 1945 (Pasal 1 ayat (3))

narapidana agar kembali berkelakuan baik dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

Permasyarakatan merupakan sebuah proses atau usaha dari pemerintah untuk narapidana dengan harapan setelah keluar dari lapas dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan mampu berbaur kembali dengan masyarakat. Pembinaan ini dapat dimulai melalui pendekatan-pendekatan mental dan cara tertentu agar dapat membantu narapidana keluar dari lubang kejahatan. Untuk melakukan pembinaan tersebut petugas Lapas harus mengetahui dan memahami latar belakang, budaya maupun kondisi dari si narapidana. Dengan demikian, akan menimbulkan rasa saling memahami diantara kedua belah pihak yang akan memudahkan dalam proses pembinaan tersebut.

Narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan tetap memiliki haknya sesuai dengan perundang-undangan antara lain melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapat perawatan baik secara jasmani maupun rohani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan aspirasi atau keluhan, memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, didampingi penasihat hukum, memperoleh pengurangan masa pidana (remisi), mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan kebebasan bersyarat, mendapat cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan pemerintah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan suatu pemerintahan dalam menentukan atau mengambil suatu kebijakan. Kewenangan pemberian remisi merupakan hak yang dimiliki oleh Menteri Hukum dan HAM, dimana hal tersebut merupakan amanat dari Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Guna melaksanakan tugas tersebut Menteri Hukum dan HAM membuat peraturannya sendiri mengenai

remisi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pemberian remisi kepada narapidana biasanya diumumkan pada hari-hari besar nasional seperti peringatan hari Kemerdekaan Nasional dan hari-hari besar keagamaan. Remisi yang biasa diberikan biasanya berupa remisi umum dan remisi khusus. Remisi juga merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Sebab hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu tanpa melihat dan membedakan latar belakangnya. Dengan demikian hak remisi tersebut harus diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang.

Kebijakan mengenai pemberian remisi kepada narapidana selalu menjadi pembicaraan yang mengandung polemik. Hal itu dikarenakan karena adanya ketidaktahuan orang awam akan prosedur dan tata cara pemberian remisi itu sendiri. Dengan adanya Keppres, Permen maupun PP yang mengatur tentang remisi pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan hak narapidana tanpa melihat jenis tindakan pidana yang dilakukan oleh narapidana sebelumnya. Namun pemberian remisi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap hukum yang berlaku positif bertujuan melaksanakan dimensi keadilan dan kemanusiaan dimana dimensi ini tidak mengenal ras, etnik dan kebudayaan yang pluralistic.

Dengan adanya remisi maka narapidana tidak menjalankan hukumannya secara keseluruhan atau secara penuh. Adapun contoh dari pemberian remisi kepada narapidana sebagai berikut:

1. Pemberian remisi kepada narapidana di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73 sebanyak 102.976 narapidana dengan 100.776 narapidana mendapatkan remisi umum dan 2.220 narapidana mendapatkan remisi khusus. Jumlah penerima remisi di Lapas Kelas I Bandar Lampung sebanyak 450 narapidana.



2. Pemberian remisi kepada narapidana di HUT RI ke-74 sebanyak 130.383 narapidana. Jumlah penerima remisi di Lapas Kelas I Bandar Lampung sebanyak 814 narapidana.

Dari contoh pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung jumlah narapidana yang menerima remisi relative banyak dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meskipun dalam menerima remisi, narapidana harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang ada. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang berada di Lapas cukup baik, sehingga banyak narapidana yang kemudian bisa memperoleh pengurangan remisi sesuai dengan persyaratan yang ada.

Remisi dalam bahasa Arab tidak dijumpai namun ada beberapa istilah yang senada seperti *Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), dan *tahfiz* (pengurangan). Selain itu, menurut Syaid Sabiq memaafkan disebut *Al-Qowdi* atau rekonsiliasi tanpa diyat melebihinya.<sup>4</sup>

Dalam Islam istilah remisi lebih dekat dengan *rukhsah* (keringanan). *Rukhsah* telah ada sejak masa Rasulullah yang dimana pengampunan itu diberikan oleh korban atau keluarga korban. Adanya pengampunan tersebut mengakibatkan pelaku tidak memperoleh hukuman atau bisa saja hanya membayar diyat yang diberikan kepada korban sebagai tanda damai. Islam selalu mengajarkan untuk saling memaafkan dan saling toleransi, sebab Islam lebih mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan adanya *rukhsah* tersebut Islam telah melindungi dan menghormati hak manusia yang telah melakukan taubat atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal ini berlandaskan pada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Syaid Sabiq (ed), *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqhus Sunah", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 419

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ.

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Burai, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Apabila ada seseorang meminta atau memerlukan suatu kebutuhan datang kepada Beliau, maka Beliau bersabda: “Berilah peringatan hukuman, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Sesungguhnya Allah dapat menetapkan hukum melalui lidah nabi-Nya sesuai kehendak-Nya.”<sup>5</sup>

Islam sebagai agama yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan umat manusia serta untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Syariat Islam merupakan syariat yang bersifat universal, yaitu diturunkan untuk semua umat di dunia, bukan untuk sebagian umat.<sup>6</sup> Islam dengan sistem hukumnya menjaga serta melindungi kehormatan manusia sehingga tercipta keseimbangan dan kemaslahatan manusia, dengan kata lain Islam sangatlah menghargai dan menjunjung tinggi nilai dari Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>7</sup>

Hukum Islam adalah pemahaman tentang Islam melalui fiqh yang didapat setelah melakukan metode ijtihad berdasarkan ilmu Ushul Fiqh dalam menentukan hukum guna menyelaraskan kehidupan manusia sehingga dapat mempertahankan kemaslahatan dan keadilan bagi semua umat. Sistem hukum Islam yang semula merupakan bagian dari kesadaran yang berlaku sehari-hari dan tidak terpisahkan dari sistem hukum adat yang beraneka penjajahan Hindia Belanda mewariskan tiga tradisi hukum kepada Indonesia merdeka, yaitu

<sup>5</sup> Imam Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari II*, terj. Abdi Ummah Ghazirah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), 536-537

<sup>6</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 105

<sup>7</sup> Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, 324

system hukum barat, system hukum Islam dan system hukum adat.<sup>8</sup> Oleh karena bangsa Indonesia merupakan negara yang majemuk, maka Islam mengatur secara umum demi terciptanya kemaslahatan dan keadilan agar setiap orang dapat hidup berdampingan dengan nyaman tanpa merasa gangguan maupun ancaman. Dengan adanya syafaat dalam fiqh siyasah Islam maka Islam telah melindungi Hak orang-orang yang mau bertaubat demi kemaslahatan bersama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung). Dimana dalam penelitian ini remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dalam Islam remisi merupakan pengampunan atau keringanan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

### **C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah untuk meneliti Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung) dan yang menjadi sub-fokus penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Staff karyawan Lapas.

### **D. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung?

---

<sup>8</sup> Sumarni, *Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, Al-Adalah Volume X. No.4 Juli 2012, 448

2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana?

#### **E. Tujuan**

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan pemberian remisi di Indonesia
2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah mengenai pemberian remisi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, diantaranya:

1. Secara tertulis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang analisis fiqh siyasah terhadap pemberian remisi kepada narapidana di Indonesia dan menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya Progra Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh siyasah.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, berikut akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan penulis teliti:

Ita Sapitri (2017) yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam tentang Pemberian Remisi terhadap Narapidana Pembunuhan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)”*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pemberian remisi telah sesuai dengan prosedur yang ada serta yang diamanahkan oleh Al-Qur’an dan Hadis.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Ita yaitu tentang pemberian Remisi yang dibenturkan dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah Ita membahas pemberian remisi yang terkhusus untuk narapidana pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pemberian remisi kepada narapidana secara umum yaitu tidak terkhusus pada tindak pidana tertentu.

Asnila Kurniati Siregar (2017) dengan judul *“Tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap Pemberian Remisi menurut Keppres No. 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi”* dalam skripsi ini disimpulkan bahwa potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan Keppres No 174 Tahun 1999 tentang remisi. Selain itu esensi dari pemberian remisi dalam siyasah syar’iyyah adalah demi kemaslahatan umat manusia sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan sunnah.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Asnila yaitu pemberian remisi berdasarkan pada Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Selain itu pemberian remisi juga dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan umat serta remisi merupakan bagian dari HAM. Perbedaan penelitian ini berdasarkan analisis Fiqh Siyasah dengan jenis tindak pidana umum maupun khusus sedangkan Asnila membahas berdasarkan siyasah syar’iyyah dengan pokoknya narapidana korupsi.

---

<sup>9</sup> Ita Sapitri, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan*. Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

<sup>10</sup> Asnila Kurniati Siregar, *Tinjauan Siyasah Syari’yyah Terhadap Pemberian Remisi Berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2017.

Virgi Ernanda, (2019) *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Remisi)*, kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pemberian remisi merupakan salah satu dari perlindungan negara dalam melindungi rakyatnya, dalam kewajibannya melindungi hak asasi manusia kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam Fiqh Siyasah Islam mengenal adanya pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum Islam dilakukan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta untuk menghormati HAM yang bagi pelaku tindak pidana yang telah bertaubat.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Virgi yaitu membahas mengenai pemberian remisi yang di analisis berdasarkan fiqh Siyasah dengan tujuan kemaslahatan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi Virgi yaitu penelitian ini dasarnya Keppres No 174 Tahun 1999 tentang remisi dan PerMen Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018, sedangkan di skripsi ini berdasarkan studi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.

Elizabeth Ghazali (2016), *Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi*, dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak yang diberikan oleh hukum dengan syarat tata cara yang harus dipenuhi oleh narapidana. Pembatasan syarat dan tata cara tersebut diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan jurnal karya Elizabeth yaitu pembahasan mengenai pemberian remisi kepada narapidana tentang syarat dan tata cara mendapatkan remisi. Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan Fiqh siyasah sedangkan jurnal Elizabeth hanya membahas kebijakan pemberian remisi dalam ranah hukum positif.

---

<sup>11</sup> Virgi Ernanda, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2019

<sup>12</sup> Elizabeth Ghazali, "Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi." *Litigasi* Volume XVII, number 1: 3167 – 3220, 2016.

Norman Syahdar Idrus, Wien Sukarmini (2016), *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, hasil penelitian dari jurnal ini bahwa remisi merupakan salah satu hak narapidana yang diberikan pemerintah atas usulan kepala lapas Kelas I Cipinang. Remisi yang diberikan berupa remisi umum dan remisi khusus. Namun dalam pelaksanaan pemberian remisi ada factor-faktor kendala akibat dari ketidaksiapan staf pada kantor wilayah kementrian hukum dan HAM pusat.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan jurnal karya Norman dan Wien yaitu dalam pembahasannya membahas mengenai remisi dimana narapidana memperoleh remisi dengan usulan dari pihak Lapas. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini didasarkan dengan fiqh siyasah sedangkan penelitian ini berdasar pada hukum postive.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang mana dilakukan analisa data yang mendalam dan melalui pemikiran berkaitan dengan teori, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum mapum doktrin hukum yang disajikan dengan melakukan pendekatan hukum secara langsung dimasyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum Islam dalam membangun hukum nasional baik materil maupun spiritual demi menjawab isu hukum yang terus berkembang. Melalui data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dikembangkan berdasarkan dengan imajinasi penulis.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

---

<sup>13</sup> Sukarmini, Norman Syahdar Idrus dan Wien. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang." *Jurnal Yuridis* Volume III, Number 2: 113 – 128, 2016.

Penelitian ini adalah penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>14</sup> Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai implementasi pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

Selain *Field Research* penelitian ini juga menggunakan *Library Research* (Penelitian Pustaka) yaitu dengan mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan,<sup>15</sup> dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data primer maupun sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah utama yang diangkat dalam penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.<sup>16</sup> Yaitu mendeskripsikan mengenai pemberian remisi kepada narapidana yang sesuai dengan *fiqh siyasah*

## 2. Sumber Data

Suber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana:

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 2

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 65

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2011), 105



- a. Data Primer, yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini data primer bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, yaitu mengenai implementasi kewenangan pemerintah dalam pemberian remisi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum Primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.<sup>17</sup> Adapun sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu jurnal-jurnal ilmiah, skripsi/tesis yang senada maupun dari berita baik dari media cetak, media masa dan media online.

### 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas serta lengkap dari objek yang akan di teliti. Berdasarkan penelitian di atas dapat di pahami bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan diteliti secara jelas.<sup>18</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung baik itu kepala bidang dan anggota di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dengan jumlah pegawai sebanyak 202 orang.

Dari jumlah pegawai yang ada peneliti diarahkan untuk wawancara dengan 2 orang pegawai yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pemberian remisi sebagai subjek penelitian. Dimana 2 orang tersebut sebagai sampel dalam penelitian ini. Subjek yang dijadikan sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini yaitu pertama Bapak

---

<sup>17</sup> *Ibid.* 107

<sup>18</sup> Op.Cit, Sugiono, *Metode penelitian pendidikan*, 194

Angga dan Bapak Ivan selaku Staff dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh mengenai syarat, prosedur, program pembinaan dan pelaksanaan dalam pemberian remisi.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan menggali sumber-sumber data yang langsung dari orang atau lembaga yang berkaitan.
- b. Wawancara, yaitu sebagai proses Tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>19</sup> Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara terstruktur, dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan dengan cara pengambilan foto-foto terkait.

#### **5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### **a. Metode Pengolahan Data**

Untuk pengolahan data maka digunakan teknik sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu suatu proses penelaahan kembali akan data-data yang telah terkumpul melalui studi pustaka yang lengkap dan relevan. Proses ini dilakukan untuk menentukan data maupun teori yang senada dan penting.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 217

2. Rekonstruksi Data (Reconstructing), yaitu penyusunan ulang data secara teratur, teratur dan logis sehingga mudah untuk dipahami pembaca.
  3. Sistematisasi Data (Sistematizing), yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup> Yaitu dengan mengelompokkan data secara sistematis sesuai dengan klasifikasi dan urutan masalah.
- b. Metode Analisi Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati.<sup>21</sup> Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara bertahap dan berlapis yang kemudian ditarik kesimpulan yang menghasilkan data baru yang sesuai dengan pemikiran imajinasi penulis.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

- a. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>20</sup> Op.Cit, Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 29

<sup>21</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 2

- b. Bab Kedua, Landasan Teori, yang meliputi: menurut hukum di Indonesia, Pengertian Remisi, Dasar Hukum dan Bentuk Remisi, Prosedur dan Kriteria Pemberian Remisi, Sejarah Lahirnya Remisi. Menurut Fiqh Siyasah, Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Pengertian Remisi, Dasar Hukum Remisi, Tujuan Pemberian Remisi, Sejarah Remisi.
- c. Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang meliputi: Gambaran Tempat Penelitian seperti, sejarah Lembaga Pemasyarakatan, Visi dan Misi, Tata Nilai dan Moto, Struktur Organisasi, dan Pelaksanaan Pemberian Remisi.
- d. Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi: Implementasi Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana.
- e. Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMBERIAN REMISI OLEH PEMERINTAH

#### A. Menurut Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari 2 kata yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. *Fiqh* berasal dari kata *faqha-yafqahu-fiqhan* yang secara bahasa berarti paham yang mendalam. Sedangkan menurut istilah *fiqh* adalah

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya : “ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).”<sup>1</sup>

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan *fiqh* adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para *mujtahid* dalam menggali suatu hukum berdasarkan dalil-dalil yang rinci yang kemudian dapat diamalkan oleh umat manusia. *Fiqh* tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah), namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini diantaranya *jinayayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *al-ahkam al-daulyah* (hubungan internasional) dan *siyasah* (politik/ketatanegaraan).<sup>2</sup>

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>3</sup> Secara bahasa *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr, 1957), 6

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3

<sup>3</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968). 108

Secara terminologis *siyasah* menurut para ahli yaitu; Abdul Wahab Khallaf *siyasah* merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>4</sup> Menurut Louis Ma'luf *siyasah* merupakan suatu upaya membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing ke jalan yang benar menuju keselamatan.<sup>5</sup> Sedangkan Ibn Manzhur *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengarahkan umat manusia dalam kemaslahatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan suatu aspek hukum Islam yang mengatur mengenai kehidupan manusia dalam berkehidupan bernegara untuk mencapai suatu kemaslahatan. Aspek hukum dalam pengaturan ini bersifat kontekstual sesuai dengan keadaan waktu dan tempat hukum ditetapkan namun tetap berdasarkan dengan *syara'*.

Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* dibagi menjadi beberapa bagian, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menyebutkan ruang lingkup *fiqh siyasah*. Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Suthaniyyah* lingkup kajian *fiqh siyasah* yaitu:<sup>7</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah malliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah qadha'iyyah* (Peradilan)
- d. *Siyassah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'iddariyyah* (administrasi negara)

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. *Siyâsah Qadlâ'iyyah* (Peradilan)

---

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 4-5

<sup>5</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1980), 362

<sup>6</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 6, 362

<sup>7</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp).

<sup>8</sup> Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*, (Mesir: Dar al-Kitab 'Arabia, t.tp).

- b. *Siyâsah `Idâriyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyâsah Mâliyyah* (ekonomi dan moneter)
- d. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah* (hubungan internasional)

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar'iyyah* mempersempit ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi tiga bidang kajian yaitu:

- a. *Siyâsah Qadlâ`iyyah* (Peradilan)
- b. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah* (hubungan internasional)
- c. *Siyâsah Mâliyyah* (ekonomi dan moneter)

Menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Iddariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan)

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, maka kajian bidang *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* meliputi *siyasah tasyri'iyyah* (politik hukum), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah iddariyyah* (administrasi negara).
- b. *Siyasah Dauliyyah* meliputi *siyasah harbiyyah* (perang).

---

<sup>9</sup> T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, (Yogyakarta: Maddah, t.tp), 8

c. *Siyasah Malliyyah*.

Dari penjelasan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peraturan mengenai pemberian remisi masuk dalam kajian *Siyasah Dusturiyyah*. Dimana hal ini berkaitan dengan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

## 2. Remisi dalam Fiqh Siyasah

Dalam hukum Islam tidak dijumpai penjelasan yang spesifik mengenai pengertian remisi. Namun ada kata atau istilah yang identik dengan arti maupun tujuan dari remisi itu sendiri seperti *rukhsah* (keringanan). Secara terminologi *rukhsah* merupakan upaya untuk meminta bantuan kepada orang lain atas kejahatan yang telah diperbuat. Dengan harapan orang yang dimintai pertolongan dapat menjadi perantara untuk memperoleh keringanan atas hukumannya.

*Rukhsah* memiliki manfaat dan tujuan untuk menjaga kemaslahatan serta melindungi hak asasi manusia atas penyesalan dari perbuatan yang telah dilakukannya (taubat). Pengampunan diberikan kepada orang yang telah berbuat kejahatan juga bisa berdasarkan dari perdamaianya dengan pihak korban.

Istilah remisi dalam hukum Islam digambarkan dengan *rukhsah* (keringanan). *Rukhsah* yang sesuai dalam pidana Islam yaitu seperti yang dikemukakan Al-Jurjani dalam kitabnya *Al-Ta'rifat*: suatu permintaan dari seseorang yang melakukan suatu kejahatan, kemudian mengharapkan kebebasan dari dosa yang telah diperbuat.<sup>10</sup> Pada hakikatnya, *syafa'at* terlahir karena kemuliaan dan kelembutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan izin kepada segenap makhluk yang shaleh, dari malaikat, para rasul, dan orang-

---

<sup>10</sup> Ali Ibn Muhammad, Al-Jurjani, *Al-Tarif*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1405

H), cet. Ke-I, 142.



orang mukmin, untuk memberi pertolongan pada hari kiamat terhadap orang-orang mukmin yang melakukan maksiat.<sup>11</sup>

*Rukhsah* dalam Islam memiliki ketentuannya sendiri, yaitu hanya berlaku pada perbuatan *jarimah Ta'zir*, sedangkan untuk *jarimah Qishas* dan *Hudud* jenis dan kadar hukumannya telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. *Rukhsah* mengenai *jarimah Ta'zir* terdapat dalam Q.S An-Nisaa ayat 16 :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا  
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepadanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyanya.” (Q.S An-Nisaa: 16)<sup>12</sup>

Pengurangan hukuman atau pengampunan pada zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah remisi. Remisi merupakan hak narapidana yang harus diberikan oleh pemerintah apabila narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya dan mau memperbaiki diri serta perilakunya untuk bertaubat.<sup>13</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain: membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa

---

<sup>11</sup> Bisri M. Jaerlani, *Ensiklopedia Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007), 308

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 80

<sup>13</sup> Angga, “Kesesuaian Ketentuan dan Prosedur Pemberian Remisi dengan Peraturan yang Berlaku”, *Wawancara*, November 27, 2020.

pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>14</sup>

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyasi* maka *fiqh siyasah* biasa dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi, *fiqh siyasah* adalah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.<sup>15</sup>
- b. Menurut *Wuzurat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait*, atau Lembaga Kementerian, *fiqh siyasah* adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan pada waktu sekarang dan masa yang akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>16</sup>
- c. Menurut Imam Ibn Abidin, *fiqh siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya pada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari nabi, baik secara umum maupun khusus, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan dari segi batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat dua unsur penting di dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik,

---

<sup>14</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3

<sup>15</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairima ala al-Manhaj*, (Bulaq: Musthafa al-Baibal-Halabi, t.t), vol. 2, 178

<sup>16</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzaratal-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol.25, 295.

<sup>17</sup> Ibn „Abidin, *Radd al-Muhtar „ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), vol.3, 147.

yang pertama yaitu pihak yang mengatur dan kedua yaitu pihak yang diatur.

### 3. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum mengenai remisi haruslah merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai aturan pemberian remisi, namun ada unsur-unsur yang membahas mengenai remisi, yaitu seperti yang tertuang dalam:

a. Q.S al-Maidah ayat 45 yaitu:

كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ  
قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Q.S Al-Maidah:45)<sup>18</sup>

Penjelasan ayat diatas yaitu untuk membuktikan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab suci mereka pada hakekatnya memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yang merupakan prinsip-prinsip dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik yang berlaku pada masa dulu maupun sekarang. Dengan demikian maka diharapkan agar ketentuan-

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 115

ketentuan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat manusia, terkhususnya oleh umat Islam.

b. Q.S An-Nisa (4) ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(Q.S An-Nisaa: 85)<sup>19</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa meberikan pertolongan yang baik, dengan perantara sehingga orang lain dapat ikut berbuat baik, maka ia juga akan mendapatkan pahala karena telah berupaya menolong orang lain. Namun sebaliknya, barang siapa yang memberikan pertolongan yang buruk sehingga menjadi perantara orang lain untuk berbuat keburukan, maka ia akan menanggung dosa karena telah berupaya dalam urusan yang buruk.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian pertolongan yaitu agar seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat memperoleh haknya sebagai warga negara dengan melakukan kebaikan.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 91

c. Q.S Asy-Syura (42) ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Q.S Asy-Syura: 40)<sup>20</sup>

Dalam surat ini menjelaskan mengenai bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Namun apabila seseorang telah bertaubat maka hendaklah kita memaafkan dan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi lebih baik, sebab Allah membenci orang-orang yang berbuat zalim.

Pemberian remisi yang dikemukakan oleh pemerintah kepada pelaku tindak pidana dengan melakukan perbuatan yang baik dan merubah dirinya memiliki tujuan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ia dapat berbaaur dan diterima dalam masyarakat kembali.

#### 4. Tujuan dan Manfaat Pemberian Remisi

Secara umum tujuan dan manfaat dari pemberian remisi yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Remisi juga merupakan hak dari setiap orang yang melakukan kejahatan dimana harus tetap dijaga dan dilindungi hak asasi manusianya.

Dalam hal ini tujuan dan manfaat dari pemberian *rukhsah* yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta menghormati hak asasi manusia atas penyesalan dari tindakan yang telah dilakukannya.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 487

- b. Untuk menghargai pihak korban yang telah memberi *rukhsah*, yaitu dengan jalan damai sesuai dengan anjurann Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam.
- c. Sebagai motivator bagi narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## 5. Sejarah Remisi dalam Islam

Pemberian remisi dalam Islam terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatab. Pada masa ini pengampunan oleh pemimpin pada pelaku kejahatan diberikan.

Akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan Nejd mengalami musim paceklik yang berat. Dimana peristiwa ini terjadi pada musim kemarau yang panjang, dikarenakan selama 9 bulan hujan tidak turun, sehingga menyebabkan bumi kering hingga menjadi seperti abu. Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pencuri, karena kurang illat yang mengharuskan hukuman potong tangan yang disebut dalam ushul fiqh dengan *Al illat An Naqishab*.<sup>21</sup>

Dalam riwayat tersebut dapat dipahami, bahwa kebijaksanaan Umar untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena ia memperhatikan subjek pelakunya dalam kondisi darurat, yaitu kesulitan mendapatkan bahan makanan ketika itu. Hal ini disebutkan pula di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 173

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "...tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa

---

<sup>21</sup> Op.Cit, Virgi Ernanda, *Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)*, 40

*baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al-Baqarah: 173)<sup>22</sup>

Dalam kasus pencurian dimasa Umar bin Al-Khattab ada dua yang bertentangan pada diri pencuri tersebut. Pertama menjaga diri dari jatuh kedalam kebinasaan dengan tidak diperolehkannya makan. Kedua menjaga harta orang lain dari teraniaya. Keduanya wajib dipelihara, karena kedua-duanya termasuk aspek *dharuriyat* (primer).

## **B. Menurut Peraturan Hukum di Indonesia**

### **1. Pengertian Remisi**

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Remisi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yang merupakan fasilitas pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Remisi juga dapat dikatakan sebagai salah satu sarana hukum yang memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mengupayakan warga binaan agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum serta diharapkan dapat berperan aktif dan berbaur dengan sesama masyarakat lainnya<sup>23</sup>. Remisi diberikan kepada narapidana sebagai *reward* atau hadiah atas program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, dimana remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana yang menunjukkan sikap dan perilaku yang baik selama masa pembinaan.

Menurut Andi Hamzah, remisi merupakan pembebasan hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi setiap tanggal 17 Agustus.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 26

<sup>23</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama (Bandung: Refika Aditama). 106

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 133

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dari Remisi. Dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”<sup>25</sup> Diatur lebih lanjut bahwa dalam KEPPRES No. 174 Tahun 1999 memberikan kewenangan pemberian remisi kepada Kementerian Hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) “Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.”<sup>26</sup>

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Remisi pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum dan Bentuk Remisi

Segala sesuatu dalam dunia hukum tentu memiliki pedoman, sebagaimana pemberian remisi. Dasar hukum pemberian remisi dapat kita ketahui sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi,
- b. Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

---

<sup>25</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi* Pasal 1 ayat (1)

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, Pasal 1 angka 3



- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Remisi yang diberikan oleh pemerintah terdapat beberapa jenis diantaranya:

a. Remisi Umum

Remisi umum merupakan remisi yang diberikan oleh pemerintah pada hari raya kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Dalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Pasal 2 huruf a menjelaskan bahwa “Remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.”<sup>28</sup>

Perhitungan masa pemberian remisi yaitu sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Masa jalan (Tahun)	Potongan Remisi (bulan)
0,5 – 1	1
1	2
2	3
3	4
4	5
Untuk tahun ke-5 (lima) dan seterusnya tetap mendapatkan remisi 6 bulan	

*Tabel 2.1. Masa Pemberian Remisi Umum*

b. Remisi Khusus

Dalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Pasal 2 huruf b menjelaskan bahwa “Remisi khusus yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.”<sup>29</sup> Remisi khusus dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, apabila ada hari keagamaan lebih dari

<sup>28</sup> Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, Pasal 2 huruf a

<sup>29</sup> Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, Pasal 2 huruf b

1 (satu) kali dalam suatu agama maka remisi diberikan pada hari besar keagamaan yang dianggap paling sakral.

Masa jalan (Tahun)	Potongan Remisi (hari)
0,5 – 1	15
1	15
2	30
3	30
4	45
Untuk tahun ke-5 (lima) dan seterusnya tetap mendapatkan remisi 60 bulan	

*Tabel 2.2 Masa Pemberian Remisi Khusus*

c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang apabila narapidana yang menjalani pidana memberikan jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>30</sup> Apabila narapidana telah berjasa bagi bangsa dan negara maka akan diberikan tambahan remisi sebesar 1/3 dari remisi umum.

### 3. Prosedur dan Kriteria Pemberian Remisi

Ketentuan dan prosedur pemberian remisi yang diberikan oleh narapidana melalui Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usulan dari Lembaga Pemasyarakatan. Proses pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mengacu pada dasar hukum yang berlaku, serta pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan tata cara pemberian remisi, artinya

---

<sup>30</sup> Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, Pasal 3 ayat (1)

Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki aturan tertentu dalam pemberian remisi.<sup>31</sup>

Dalam pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.”<sup>32</sup>

Secara administratif prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan remisi yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum,
- b. Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri,
- c. Surat Penahanan dari Kepolisian
- d. Kartu pembinaan
- e. Catatan Kepribadian atau Perilaku
- f. Tidak melakukan pelanggaran selama di Lembaga Pemasyarakatan (Register F), apabila Narapidana yang bersangkutan melakukan pelanggaran usulan remisi dapat dibatalkan.

Setelah semua persyaratan yang diperlukan terpenuhi, Kepala Lapas dan Tim Penilai akan menyerahkan berkas tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai usulan pemberian Remisi kepada Narapidana. Berkas usulan Remisi kemudian diverifikasi kelengkapan persyaratannya paling lama 2 (dua) hari sejak usulan disampaikan, apabila ada berkas yang belum terpenuhi maka akan dikembalikan ke pihak Lapas untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan usul pemberian Remisi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengembalian usulan pemberian Remisi diterima.

---

<sup>31</sup> Angga, “Kesesuaian Ketentuan dan Prosedur Pemberian Remisi dengan Peraturan yang Berlaku”, *Wawancara*, November 27, 2020.

<sup>32</sup> Keputusan Presiden, *Op.cit.*, Pasal 13 ayat (1)

<sup>33</sup> Angga, “Kesesuaian Ketentuan dan Prosedur Pemberian Remisi dengan Peraturan yang Berlaku”, *Wawancara*, November 27, 2020.

Hasil perbaikan yang telah selesai disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jendral.

Berkas yang telah diverifikasi oleh Direktur Jendral dan telah disetujui usulan Remisinya kemudian akan dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh ketetapan hukum. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk disampaikan kepada Narapidana yang memperoleh Remisi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian Remisi dan selanjutnya, diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem informasi kemasyarakatan.<sup>34</sup>

Adapun kriteria persyaratan yang harus dipenuhi Narapidana untuk memperoleh remisi diantaranya:<sup>35</sup>

- a. Berkelakuan baik, dan
- b. Menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Syarat berkelakuan baik yang dimaksud diatas, yaitu dibuktikan dengan<sup>36</sup>:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung tanggal pemberian remisi,
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, pelanggaran HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi harus memenuhi persyaratan Remisi sebagai mana dalam Pasal 5 dan memenuhi persyaratan lainnya yaitu:

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, Pasal 21 ayat (1)

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1)

<sup>36</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan,
- b. Mengikuti program Deradikalisasi
- c. Menyatakan ikrar setia kepada Negara dan pernyataan tidak mengulangi kejahatannya.
- d. Membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa pada prinsipnya pemberian remisi kepada narapidana memiliki persyaratan yang sama. Namun ada tambahan syarat yang berlaku bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan dalam golongan yang cukup berat, seperti korupsi, narkoba dan lain-lain. Perbedaan persyaratannya hanya terletak pada berkas, namun untuk proses dan tahapan selanjutnya sama.

#### 4. Sejarah Lahirnya Konsep Remisi

Pemberian remisi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 Tahun 1999 tentang Remisi yang belum sempat diterapkan namun telah diubah lagi dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang masih berlaku hingga saat ini.

Berikut merupakan aturan yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda hingga saat ini:<sup>37</sup>

- a. Gouverment besluti tanggal 10 Agustus 1935 No. 223 bijblad No. 13515 Jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22 : merupakan hadiah yang diberikan semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
- b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Acara Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri

---

<sup>37</sup> Sukarno, *Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012, (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM)*, Vol. 6 Edisi II (Mataram:Jurnal Gema Keadilan, 2019), 148-149

Kehakiman RI No. G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 Jo. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang Pengampunan.

- c. Keputusan Presiden No. 5 tahun 1987 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan-keputusan Presiden No. 5 tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04-HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.0201 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987.
- d. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Atas Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

Dari banyaknya peraturan-peraturan yang mengalami perubahan mengenai pemberian remisi tersesbut diatas dapat kita simpulkan bahwa lika-liku prinsip pemberian remisi tidaklah mudah. Dalam hal ini pemberian Remisi dapat diberikan oleh pemerintah kepada narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap narapidana yang memenuhi persyaratan berhak mengajukan dan memperoleh remisi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadist**

- Departemen Agama RI, 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Jakarta: Departemen Agama.
- Imam Bukhari, 2002. *Terjemah Shahih Bukhari II*, terj. Abdi Ummah Ghazirah, Jakarta: Pustaka Azam

### **Buku**

- Ahmad, B. (n.d.). *Filsafat Hukum Islam*.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika.
- Al-Mawardi. (n.d.). *al-Akham al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-Shidieqy, T. H. (n.d.). *Pengantar Siyasa Syariyyah*. Yogyakarta: Maddah.
- Hadi, S. (1986). *Metodologi Research, Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- Hanafi, A. (1976). *Asas-asas Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jaelani, B. M. (2007). *Ensiklopedia Islam*. Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta.
- Khallaf, A. W. (1997). *Al-Siyasa al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Ma'luf, L. (1980). *al-Munjid fi al-Lughah wa al'A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Manzhur, I. (1968). *Lisan al-'Arab Jus 6*. Beirut: Dar al-Shadr.
- Moloeng, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. I. (n.d.). *Al-Jurjani Al-Tarif*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Priyanto, D. (n.d.). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.



- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunah*". Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taimiyah, I. (n.d.). *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab 'Arabia.
- Zada, M. I. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Zahrah, M. A. (1957). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al Fikr.
- Peraturan Perundang-undangan
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi,
- Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

### **Jurnal dan Naskah Ilmiah**

- Ernanda, Virgi. 2019. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)*. Bandar Lmapung: UIN Raden Intan Lampung.  
<http://repository.radenintan.ac.id/6474/1/SKRIPSI%20VIRGI%20ERNANDA.pdf>.
- Ghozali, Elizabeth. 2016. "Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi." *Litigasi* Volume XVII, number 1: 3167 - 3220.
- Sapitri, Ita. 2017. *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Siregar, Asnila Kurniati. 2017. *Tinjauan Siyasah Syari'yyah Terhadap Pemberian Remisi Berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi*. Medan: UIN Sumatra Utara.

Sukarmini, Norman Syahdar Idrus dan Wien. 2016. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang." *Jurnal Yuridis* Volume III, Number 2: 113 - 128.  
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/175/147>.

Sumarni, 2012, *Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, Al-Adalah Volume X. No.4 Juli  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/298/640>

### **Sumber Online**

Budhiana, Nyoman. 2019. *HUT Ke-74 RI, 130.383 Narapidana Dapat Remisi*. Jakarta: Bisnis.com.  
<https://m.bisnis.com/amp/read/2019-817/16/1137729>.

Profil Lembaga Pemasyarakatan,  
<http://lapaslampung.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> (selasa 1 des 2020 pk. 11.30)

### **Wawancara**

Angga, Wawancara, 2020. "Kesesuaian Ketentuan dan Prosedur Pemberian Remisi dengan Peraturan yang berlaku", Bandar Lampung.

Ivan, Wawancara, 2020, "Syarat Administratif Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Tertentu", Bandar Lampung.

